



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
TAHUN 2016-2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diperlukan Rencana Aksi Daerah untuk menentukan kebijakan dan strategi pencapaiannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 106);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2021.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun.
8. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- (2) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target *Sustainable Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

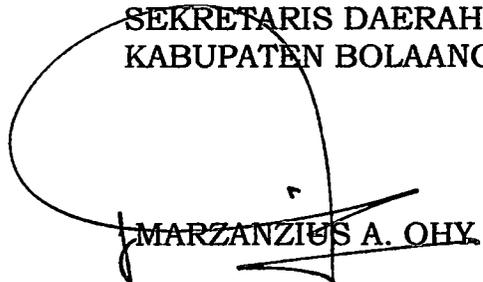
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
ISKANDAR KAMARU

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

MARZANZIUS A. OHY

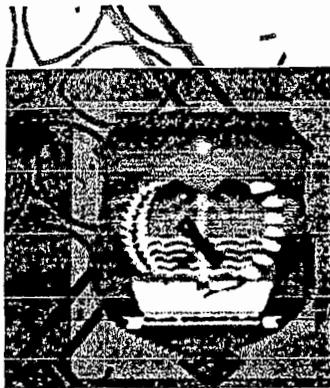
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2018 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2018

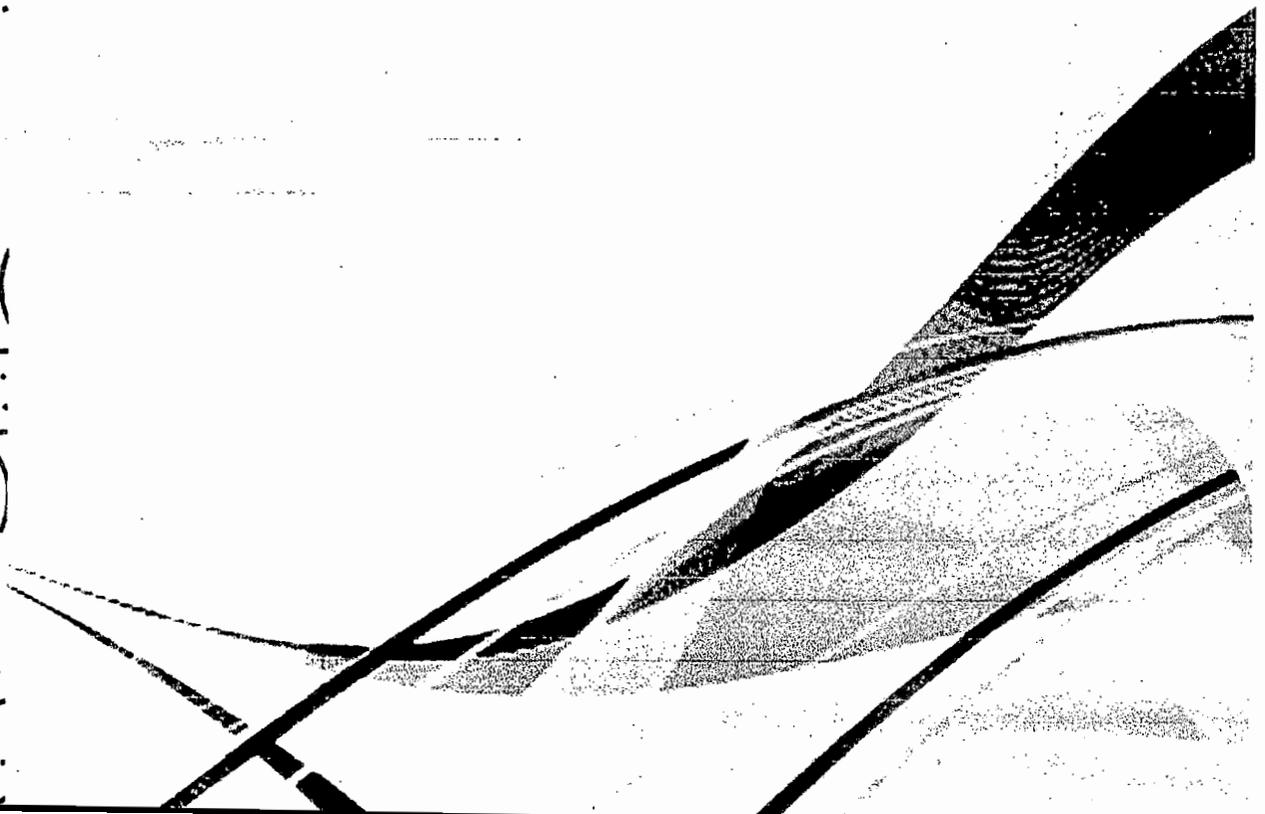
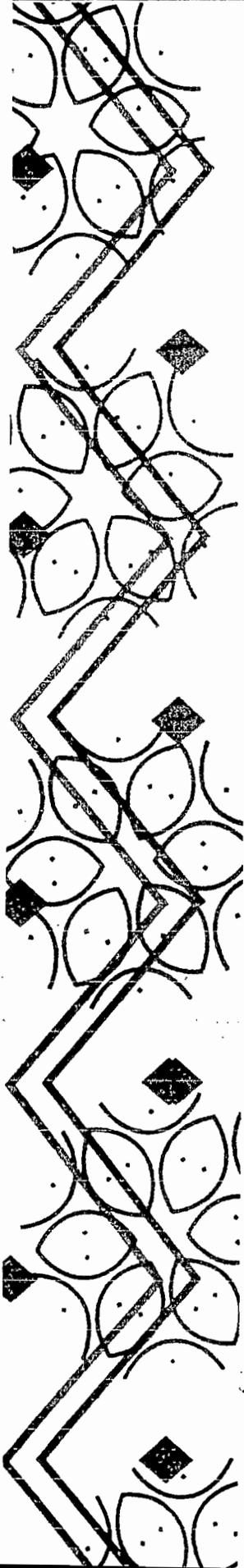
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TAHUN
2016-2021



**PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2017-2021**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Pemerintah daerah wajib melaksanakan Rencana Aksi Daerah untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, sosial, pertanian, bencana serta perlindungan perempuan dan anak. Penting untuk mempertegas komitmen pemerintah daerah serta menyelaraskan dan membentuk sinergi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan. Dari 17 (tujuh belas) tujuan, maka terdapat 105 target yang harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami sampaikan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga dokumen ini bisa selesai sesuai dengan diharapkan. Dokumen ini merupakan bagian dari dokumen prasyarat Rencana Penguasaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai pendamping dokumen RPJMD 2016-2021.

Dokumen "**Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals** Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan digunakan sebagai rancangan acuan program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan tujuan untuk penanggulangan kemiskinan yang akan diintegrasikan pada proses penyusunan RPJMD. Dokumen ini penting disusun secara mandiri oleh sumberdaya agar bersifat implementatif dan menjadi payung bagi rencana aksi daerah dalam pencapaian . Dokumen RAD-SDGs ini memberikan berbagai Tujuan, Target dan indikator untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan RAD- SDGs ini, kami menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan, baik dari sisi teknis penulisan maupun substansi materi Dokumen RAD-SDGs. Oleh karena itu kami mengharap Saran usul yang berupa masukan-masukan yang konstruktif sehingga dokumen ini menjadi lebih baik, dan dapat dipakai sebagai pedoman bagi semua pihak dalam rangka

menanggulangi kemiskinan di Kabupaten di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan RAD-SDGs ini, bersama ini kami mengucapkan terima kasih.

Bolaang Uki,

2017

TIM PENYUSUN



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	1
1.2 Permasalahan dan Tantangan	3
BAB II ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN	
2.1 Tujuan, Target dan Indikator TPB	7
2.2 Kebijakan RPJMN / RPJMD Tentang TPB	27
2.3 Program dan Kegiatan TPB	35
BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI & PELAPORAN	
3.1 MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI	167
3.2 MEKANISME PELAPORAN	188
BAB IV PENUTUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar. Saat ini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih memiliki beberapa target MDGs pada tahun 2015 yang belum tercapai diantaranya jumlah penduduk miskin masih mencapai 15,17 %.

IPM tahun 2015 mengalami peningkatan namun masih rendah hanya 63,72 tahun. APM untuk SMA/SMK hanya mencapai 50,44 % bahkan rasio guru terhadap murid per kelas masih tinggi dan Angka Putus Sekolah SD/MI justru meningkat di Tahun 2015. Disisi lain jumlah anak yang melanjutkan sekolah ke level SMP/MTs justru mengalami penurunan di tahun 2015.

Dibidang kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi justru meningkat di tahun 2015, dengan jumlah posyandu sudah mencapai 83 unit yang tersebar di tingkat desa. Jumlah peserta KB aktif dan cakupan pelayanan alat kontrasepsi KB masih rendah dari target yang diharapkan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja baru mencapai 49,45 %.

1.2. PERMASALAHAN & TANTANGAN

Tahun 2018 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berpegang pada visi dan misi tahun 2016 - 2021 yaitu "*Terwujudnya Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Berbudaya, Bermartabat, Maju dan Sejahtera*".

Adapun misi pembangunan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih melalui terwujudnya pembangunan bidang hukum, aparatur daerah, komunikasi dan informasi, serta ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan SDM.
3. Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah melalui terwujudnya pembangunan bidang pertanian, peternakan dan kehutanan, sumber daya kelautan, pertambangan, transportasi, perdagangan, dan pengembangan usaha mikro.
4. Meningkatkan kapasitas pengembangan potensi wilayah melalui terwujudnya pembangunan perdesaan, penataan ruang, SDA dan lingkungan hidup.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditetapkan sasaran pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat;
3. Masyarakat Kabupaten Bolaang Mondow Selatan yang taat hukum dan memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan aman.
4. Setiap aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya, menerapkan etos kerja

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Proaktif serta memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu

5. Meningkatnya penganggaran resposif gender serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah
 6. Setiap SKPD mencapai sasaran kinerjanya serta menerapkan administrasi yang akuntabel
 7. Seluruh anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan minimal SMA, dan lulusan SMA menguasai keterampilan wirausaha, teknologi informasi, bahasa asing dan religius
 8. Membangun dan meningkatkan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan tempat peribadatan/agama
 9. Menjadikan sistim pelayanan pendidikan yang murah dan mudah terjangkau oleh masyarakat.
 10. Pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas serta mudah dijangkau oleh masyarakat
 11. Seluruh keluarga sadar gizi, ikut KB dan gemar membaca.
 12. Seluruh Desa menjadi Desa Siaga
 13. Pemuda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meraih prestasi regional dan nasional di bidang olahraga, seni budaya, iptek dan imtaqa (Iman, Taqwa, Ahlakul Karimah).
 14. Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 15. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja
 16. Peningkatan sistim dan penciptaan iklim kondusif dalam berusaha
 17. Penguatan ekonomi kerakyatan
 18. Pemanfaatan sumber daya lokal yang bernilai ekonomis tinggi
 19. Mengembangkan kerja sama dengan kabupaten tetangga dalam pengelolaan Sumber Daya Alam
 20. Setiap kecamatan memiliki sentra pelatihan produksi dan pendampingan wirausaha yang mampu mengembangkan potensi di kecamatannya
 21. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perhubungan
 22. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan
- BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017**

pemukiman terutama pembangunan rumah layak huni

23. Peningkatan kapasitas jalan penghubung sentra-sentra ekonomi dan prasarana transportasi lainnya
24. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sarana 1 prasarana perekonomian

Berbagai hal berhubungan dengan sasaran pembangunan ini sangat menopang pencapaian SDGs di daerah ini. Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah menetapkan prioritas pembangunan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur kawasan ibu kota, kawasan pemerintahan, dan sentra-sentra perekonomian
2. Pengentasan Kemiskinan
3. Pembangunan mental spiritual masyarakat
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur bidang pendidikan
5. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur bidang kesehatan
6. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur bidang perumahan rakyat
7. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi
8. Pelestarian lingkungan hidup
9. Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan industri berbasis agribisnis
10. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia
11. Pengembangan industri wisata bahari
12. Peningkatan investasi dan pengembangan UMKM
13. Perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
14. Pemberdayaan masyarakat pedesaan

Memperhatikan kondisi perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hingga tahun 2015 sesuai pencapaian MDGs, maka kondisi perekonomian masih diperhadapkan pada tantangan dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, antara lain :

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Terus meningkatnya konsumsi BBM non subsidi yang diiring dengan kerentanan fluktuasi harga BBM. Secara tidak langsung akan mengganggu *distribusi barang dan jasa*.
2. Kondisi infrastruktur yang belum memadai di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu *distribusi barang dan jasa*. Perbaikan infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan suatu keharusan untuk mendukung perekonomian lokal, provinsi dan nasional mengingat posisi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam jalur lingkaran Trans Selatan.
3. Jumlah penduduk sebagai bonus demografi dengan komposisi usia produktif yang terus meningkat dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, bonus demografi berupa peningkatan usia harapan hidup menuntut penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
4. Terus munculnya tuntutan UMP yang terkadang dengan besaran yang memberatkan dari sisi pengusaha yang akan memberatkan menjadi tantangan bagi kebijakan investasi di masa yang akan datang.
5. Potensi dan gangguan keamanan terkait dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus di waspadi dan perlu ada peningkatan upaya untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tetap terjaga.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

PENCAPAIAN TPB

2.1. TUJUAN, TARGET DAN INDIKATOR TPB

Berikut berisi target dan indikator dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR
TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN	
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.	<p>Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</p> <p>Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi.</p>
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	<p>Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).</p> <p>Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.</p> <p>Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.</p> <p>Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat.</p>
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	<p>Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan..</p> <p>Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.</p> <p>Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.</p> <p>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</p> <p>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</p>

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

	<p>Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat. Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.</p>
<p>Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana</p>	<p>Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. kibat bencana terhadap GDP global. (Tier II). Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah. (Tier II).</p>
<p>Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</p>	<p>Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.</p>
<p>TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN</p>	
<p>Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</p>	<p>Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.</p>
<p>Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p>	<p>Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita. Prevalensi anemia pada ibu hamil. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.</p>

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

<p>Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian</p>	<p>Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam. Terlaksananya distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh tani dan nelayan. Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu.</p>
<p>Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</p>	<p>Tersalurkannya sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan.</p>
<p>Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peeliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.</p>	<p>Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas. Terselenggaranya sistem pengembangan, pembinaan, pengawasan dan sertifikasi perbenihan dan perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang efisien di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat di kecamatan. Berkembangnya program dan pembangunan di 1.000 Desa Mandiri Benih. Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.</p>
<p>TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA</p>	
<p>Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.</p>	<p>Angka Kematian Ibu (AKI). Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.</p>
<p>Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000).</p>	<p>Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.</p>
<p>Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p>	<p>Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV. Prevalensi HIV pada populasi dewasa. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Kejadian Malaria per 1000 orang.</p>

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

	<p>Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobati. Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis 100%.. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis.</p>
<p>Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</p>	<p>Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun. Prevalensi tekanan darah tinggi. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun. Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara. Angka kematian dari percobaan bunuh diri. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.</p>
<p>Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan</p>	<p>Jumlah penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Jumlah yang menyelesaikan program rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan. Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu Prevalensi penyalahgunaan narkoba. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.</p>
<p>Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p>	<p>Proporsi pasangan usia subur (umur 15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Metneed KB/ Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) Total Fertility Rate (TFR).</p>
<p>Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p>	<p>Unmet need pelayanan kesehatan. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</p>
<p>Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.</p>	<p>Angka kematian akibat keracunan.</p>

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI).
TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS	
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SDSMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di {1} SD/MI/ sederajat; {2} SMP/MTs/ sederajat; {3} SMA/SMK/MA/ sederajat;

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 1559 tahun.
Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang
Pada tahun 2030, Secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik

TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER

Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

sederajat.

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

<p>Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p>	<p>Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.</p>
<p>Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta mendokumentasikan hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut</p>	<p>Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.</p>
<p>Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</p>	<p>Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.</p>
<p>TUJUAN 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK</p>	
<p>Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</p>	<p>Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.</p>
<p>Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan</p>	<p>Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.</p>
<p>Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global</p>	<p>Proporsi limbah cair yang diolah secara aman. Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik. Kualitas air danau. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.</p>

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

<p>Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air</p>	<p>Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu. Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. Tingkat water stress: proporsi pengambilan {withdrawal} air tawar terhadap ketersediannya</p>
<p>Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat</p>	<p>Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100). Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS Jumlah wilayah sungai (WS) yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan. Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah. Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.</p>
<p>Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.</p>	<p>Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu. Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya. Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%. Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya. Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi. Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.</p>
<p>Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang</p>	<p>Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.</p>
<p>Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan</p>	<p>Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait</p>

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

sanitasi	partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Rasio elektrifikasi Konsumsi listrik per kapita Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga Rasio penggunaan gas rumah tangga
Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	Bauran energi terbarukan.
Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energy di tingkat global sebanyak dua kali lipat	Intensitas energi primer.
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDB perkapita. PDB per kapita
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin Persentase tenaga kerja formal Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian Persentase akses layanan keuangan formal UMKM
Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	Upah rata-rata per jam pekerja Tingkat pengangguran terbuka Persentase setengah pengangguran
Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB Jumlah wisatawan mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Jumlah devisa sektor pariwisata Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja
Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa. Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (15 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak
Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

2017

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Jobs Pact of the International Labour Organization.	
TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Kondisi mantap jalan nasional Panjang pembangunan jalan tol Panjang jalur kereta api Jumlah bandara Jumlah dermaga penyeberangan Jumlah pelabuhan strategis
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita ju pertumbuhan PDB industri manufaktur Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur
Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri
Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri Emisi Gas Rumah Kaca
Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	Proporsi anggaran riset pemerintah.
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi rumah tangga terlayani mobile broadband Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam Proporsi individu yang menggunakan Internet
TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN	
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Koefisien Gini Tingkat kemiskinan Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan jumlah Desa Tertinggal Jumlah Desa Mandiri Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	Indeks Kebebasan Sipil Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

	lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat
Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik	nagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi
TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP..
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama. Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis. Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan
Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota. Persentase sampah perkotaan yang tertangani. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green di kawasan perkotaan metropolitan Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	Proporsi ruang terbuka hijau untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir). Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya
Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, deng	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	
Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	Framework of Programmes on Sustainable Jumlah kolaborasi tematik quickwins program
Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.	Jejak material (material footprint). Konsumsi material domestik (domestic material consumption).
Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	Indeks kehilangan makanan global
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing. Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU. Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
Mendukung negaranegara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.
Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi,

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati
Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak	Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.
TUJUAN 13 : PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia. Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan Perguruan tinggi mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, system individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.
Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD
Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

	kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal
TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN	
Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.
Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.
Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.
Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.
Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	Jumlah luas kawasan konservasi perairan
Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing). Persentase kepatuhan usaha
Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.	kecil, negaranegara kurang berkembang dan semua negara.
Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.
Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil. Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan. Jumlah nelayan yang terlindungi.
Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN	
Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Kawasan hutan sebagai persentase dan total luas lahan Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya
Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung Indeks tutupan hijau pegunungan

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

berkelanjutan.	
Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.
Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memasukkan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.
Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI) Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati <i>hewani dan nabati</i> .
Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan
Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan
Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun.	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

	<p>dalam 12 bulan terakhir.</p> <p>Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.</p>
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	<p>Proporsi anak umur 1-14 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir</p> <p>Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan</p> <p>Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.</p>
Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	<p>Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.</p> <p>Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.</p> <p>Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.</p> <p>Proporsi tahanan terhadap seluruh jumlah tahanan dan narapidana.</p>
Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	<p>Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).</p> <p>Indeks Persepsi Korupsi (JPK).</p>
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	<p>Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.</p> <p>Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).</p> <p>Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).</p> <p>Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.</p> <p>Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)</p> <p>Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).</p>
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	<p>Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).</p> <p>Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).</p> <p>Indeks Lembaga Demokrasi.</p> <p>Indeks Kebebasan Sipil.</p> <p>Indeks Hak-hak Politik.</p>
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	<p>Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil.</p> <p>Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk</p>

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

	40% berpendapatan bawah Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi. <i>Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</i> Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.
Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik
memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	Proporsi volume remitansi (dalam US dollars) terhadap total GDP.
Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.
Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	Peningkatan kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka kerjasama Selatan-selatan dan Triangular. Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kabupaten/kota Persentase penetrasi koneksi akses tetap (fixed broadband) di Perkotaan (20Mbps) dan di Perdesaan (10Mbps). Persentase penetrasi akses bergerak pitalebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) di Perkotaan dan di Perdesaan

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

<p>Penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.</p>	<p>Proporsi individu yang menggunakan Internet. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet</p>
<p>Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan triangular.</p>	<p>Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.</p>
<p>Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.</p>	<p>Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).</p>
<p>Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020</p>	<p>Pertumbuhan ekspor produk non migas</p>
<p>Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.</p>	<p>Tersedianya Dashboard Makroekonomi.</p>
<p>Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.</p>	<p>Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), transaksi proyek KPBU dan dukungan pemerintah.</p>
<p>Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p>	<p>Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Utama (SIRuSa) Jumlah indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target Review Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Tersusunnya National Strategy for Development Statistics (NSDS)</p>
<p>Meningkaltkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</p>	<p>Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga. Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan atau Pranata Komputer. Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. Persentase konsumen yang puas terhadap akses</p>

**BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017**

	data BPS. an Perumahan pada tahun 2020 Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.
--	---

2.2. KEBIJAKAN RPJMN / RPJMD TENTANG TPB

Berikut adalah kebijakan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD 2016 - 2021 yang sesuai dengan TPB/SDGs:

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; (ii) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; dan (iii) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.

Kebijakan RPJMD terutama yang berhubungan dengan tujuan pada misi II yaitu mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Beberapa kebijakannya antara lain 1) melanjutkan upaya mendapatkan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas; 2) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi rumahtangga miskin dan kurang mampu; 3) meningkatkan perlindungan finansial dan mutu pelayanan dasar, serta ketersediaan, penyebaran dan mutu obat serta sumber daya kesehatan; 4) mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi PMKS; dan 5) meningkatkan penataan sistem pelayanan kesehatan dan rujukan kepada masyarakat miskin.

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi
**BAPPSELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017**

pangan pokok; (ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terkait dengan Misi II dengan berbagai kebijakannya 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; dan 2) meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan.

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (ii) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (iii) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (iv) Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (v) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (vi) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (vii) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (viii) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (ix) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; dan (x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan dalam RPJMD terutama terkait dengan 1) mewujudkan mutu sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; 2) memantapkan pelaksanaan SJSN; 3) akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas; 4) meningkatkan keluarga sadar gizi; dan 5) meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB.

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan

keterampilan; (iv) Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan; (v) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; (vi) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (vii) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; (viii) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi; (ix) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi; (x) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; dan (xi) Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

Kebijakan umum dalam RPJMD 2016 - 2021 diantaranya 1) pengembangan kualitas dan kuantitas pendidikan; 2) peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas; 3) mewujudkan mutu sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; 4) menyelenggarakan pendidikan murah dan mudah terjangkau; dan 5) meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah.

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (ii) Menekankan peran perempuan di bidang politik; dan (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berhubungan dengan kesetaraan gender adalah peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas kesetaraan gender di segala sektor pembangunan.

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (v) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (vi) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (vii)

Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan (viii) Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

Beberapa kebijakan dalam RPJMD tampak pada 1) meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi; dan 2) mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air bersih;

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan produksi energi primer; (ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (iii) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam Bauran energi; (iv) Meningkatkan aksesibilitas energi; (v) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; dan (vi) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.

Dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow kebijakannya tampak pada Misi IV yaitu penguatan ketahanan energi melalui pembangunan PLTS.

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; (ii) Pemasaran pariwisata nasional; (iii) Pembangunan industri pariwisata; (iv) Pembangunan kelembagaan pariwisata; (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial; (vii) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan; (viii) Kebijakan keuangan mikro inklusif; (ix) Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank; dan (ix) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan.

Kebijakan dalam RPJMD yang sesuai 1) pengembangan sarana dan prasarana ekonomi wilayah strategis dan cepat tumbuh; 2) meningkatkan dan menciptakan wirausaha baru; 3) meningkatkan konektivitas ekonomi melalui

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017

ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal; 4) pembangunan ekonomi perdesaan untuk mendorong konektivitas desa – kota; 5) meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu; 6) penciptaan lapangan kerja melalui skema pembiayaan peningkatan daya saing; 7) mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah; dan 8) memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di perdesaaan dan perkotaan.

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (ii) Pengarusutamaan (mainstreaming) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur; (iii) Implementasi prinsip *Value for Money* (VfM); (iv) Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur; (v) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (vi) Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi; (vii) Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; (viii) Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar; (ix) Pembangunan taman tekno dan taman sains; (x) Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (xi) Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (xii) Akselerasi pertumbuhan pariwisata; (xiii) Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (xiv) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Beberapa kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow adalah 1) akselerasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung perekonomian Bolssel; 2) peningkatan infrastruktur SDA; 4) percepatan penyediaan infrastruktur jalan yang merata; 5) meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal; 6) meningkatkan daya saing industri; 7) meningkatkan nilai tambah pertanian; dan 8) meningkatkan sistem dan investasi iklim yang kondusif; dan 8) meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menciptakan pertumbuhan inklusif; (ii) Memperbesar investasi padat kerja; (iii) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; (iv) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; (v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; dan (vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

Kebijakan RPJMD tampa pada 1) perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan UMKM; dan 2) pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi.

Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (ii) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (iii) Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (iv) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan (v) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

Kebijakan berhubungan dengan kota dan permukiman dalam RPJMD meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan pemukiman; serta pembangunan sesuai tata ruang wilayah dan pencemaran lingkungan.

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. Dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tampak pada kebijakan meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan produksi pangan.

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (ii) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (iii) Meningkatkan akurasi dan

**BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017**

kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (iv) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; dan (v) Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan.

RPJMD kebijakan daerah terutama dalam kesiagaan dan penanggulangan bencana.

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (ii) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (iii) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; dan (iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tampak pada meningkatkan kualitas sumber daya air, sungai, pesisir dan laut dan pencegahan serta pemberantasan IUU Fishing.

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (ii) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; dan (iii) meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.

Kebijakan daerah terutama dalam meningkatkan kualitas SDA dan pemeliharaan kelestariannya seperti sumber daya hutan.

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; (ii) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik; (iii) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan

kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik; (iv) Penerapan *e-government* untuk mendukung proses bisnis pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi; (v) Penerapan open government; (vi) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; (vii) Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; (viii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (ix) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (x) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; (xi) Meningkatkan kualitas penegakan hukum; (xii) Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM; (xiii) Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; (xiv) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (xv) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; (xvi) Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; (xvii) Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi; (xviii) Meningkatkan pencegahan korupsi; (xix) Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (xx) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan; serta (xxi) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal.

Kebijakan dalam RPJMD terutama pada Misi I seperti 1) meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2) meningkatkan kualitas layanan publik; dan 3) menerapkan sistem pengawasan internal; meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur.

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif; (ii) Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global; (iii) Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan triangular; (iv) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran; (v) Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband; (vi) Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); (vii) Peningkatan

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

2017

Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; (viii) Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik; (ix) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi; (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif; serta (xi) Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya.

Dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow tampak pada meningkatkan kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil; penguatan kemitraan dalam kepariwisataan; peningkatan fasilitas kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata; dan peningkatan kerjasama bidang pemerintahan strategis lintas kabupaten.

2.3. PROGRAM & KEGIATAN TPB

Program Prioritas sesuai dengan target dan prioritas pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat secara rinci pada tabel-tabel berikut ini.

MATRIKS 1 SDGs KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN (5 target dan 24 indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.	16.67%	32.22	44.44	55.56	66.67	Semua SKPD	
	Persentase dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi. Tdk memiliki rumah sendiri = 541 Air yang tidak terlindungi = 1.620 Tidak memiliki listrik = 234 Tdk memiliki jamban = 4.361 Tdk memiliki <i>septictank</i> = 4.037	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	Dinas PU & Penataan Ruang, Pertanahan & Kawasan Pemukiman	
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Jumlah penduduk PBI melalui JKN/KIS.	85%	90%	92%	95%	95%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & KB	
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	0	7.5%	13%	25%	50%		
	Jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (340 disabilitas)	340	100 jiwa	150 jiwa	100 jiwa	100 jiwa		
	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat.(PKH)	2.233	Turun	Turun	Turun	Turun		
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan,	Persentase/jumlah Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di	83,3	Turun	Turun	Turun	Turun	Dinas Kesehatan	

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	fasilitas kesehatan.						
	Persentase/jumlah anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Dinas Kesehatan
	Jumlah/Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	didata	didata	didata	didata	didata	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & KB
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	68%	75%	80%	85%	90%	Dinas PU & Penataan Ruang, Pertanahan & Kawasan Pemukiman
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	41,50%	65%	75%	80%	100%	Dinas PU & Penataan Ruang, Pertanahan & Kawasan Pemukiman
	Angka Partisipasi Murni (APM) di SD/MI/ sederajat.	83,74%	86%	87%	90%	97%	Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga
	Angka Partisipasi Murni (APM) di SMP/MTs/ sederajat.	76%	84%	86%	88%	97%	Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga
	Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran.	2210 lbr	2650 lbr	3180 lbr	3810 lbr	4570 lbr	Dinas Adm Kependudukan & Capil
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (BDT = 5.134)	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas PU & Penataan Ruang, Pertanahan & Kawasan Pemukiman
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi,	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	BPBD
	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	BPBD
	Jumlah Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	BPBD

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

sosial, lingkungan, dan bencana	Jumlah Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Bim terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	BPBD
	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Bim terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	BPBD
	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Bim terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	BPBD
	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah. (Tier II).	Perlu kajian	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	BPBD
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Bim terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	Bappelitbang
	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Bim terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	Bappelitbang

TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN (5 target dan 17 indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan & Perikanan	
	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	Dinas Kesehatan	
	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Tdk terdata	terdata	terdata	terdata	Terdata	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan & Perikanan	
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Tdk terdata	terdata	terdata	terdata	Terdata	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan & Perikanan	
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	0	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Kesehatan	
	Prevalensi Malnutrisi (<i>wasting/obesitas</i>) pada anak balita.	0	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Kesehatan	
	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	10.75%	10.75%	10.75%	10.75%	10.75%	Dinas Kesehatan	
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	59%	61%	62%	64%	65%	Dinas Kesehatan	
	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	83.40 %	85%	87.40%	89%	91.40%	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan & Perikanan	
Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli,	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan & Perikanan	
	Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam.	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian	Terlaksananya distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh tani dan nelayan.	Bim terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu.	Bim terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		
Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	Tersalurkannya sarana dan produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan.	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan & Perikanan	
Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan diañekaragaman dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.						Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan & Perikanan	
	Terselenggaranya sistem pengembangan, pembinaan, pengawasan dan sertifikasi perbenihan dan perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang efisien di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat di kecamatan.							Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan & Perikanan
	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.		terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan & Perikanan

TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (12 target dan 43 indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI)	5/100.000	turun	turun	turun	turun	Dinas Kesehatan	
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	83,3 %	naik	naik	naik	naik		
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Bln terdata	naik	naik	naik	naik		
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000).	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	20,1/1000	turun	turun	turun	turun	Dinas Kesehatan	
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1/1000	turun	turun	turun	turun		
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	6,76/1000	turun	turun	turun	turun		
	Persentase kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	69,79	naik	naik	naik	naik		
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	1	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Kesehatan	
	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	1	1	1	1	1		
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Bln terdata	turun	turun	turun	turun		
	Kejadian Malaria per 1000 orang.	23/1000	turun	turun	turun	turun		
	Jumlah kecamatan dengan eliminasi Malaria	Tdk terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Tdk terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Tdk terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

	Prevalensi Penderita Kusta per 10.000 penduduk.	2,98/10.000	5	4	3	2	
	Angka penemuan kasus baru kusta per 100.000 penduduk	29,8/100.000	50	40	30	20	
	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis 100%.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Kesehatan
	Prevalensi tekanan darah tinggi.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara.	10%	20%	30%	40%	50%	
	Angka kematian dari percobaan bunuh diri.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	-	Ada layanan	Ada layanan	Ada layanan	Ada layanan	
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Jumlah penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Kesehatan
	Jumlah yang menyelesaikan program rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	Ada layanan	Ada layanan	Ada layanan	Ada layanan	
	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	-	Ada layanan	Ada layanan	Ada layanan	Ada layanan	
	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	-	Ada layanan	Ada layanan	Ada layanan	Ada layanan	
	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur	-	terdata	terdata	terdata	terdata	

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

	≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.						
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Proporsi pasangan usia subur (umur 15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Metneed KB/ Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & KB
	Jumlah Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Kesehatan
	Jumlah Total Fertility Rate (TFR).	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet need pelayanan kesehatan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Kesehatan
	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Kesehatan
	Jumlah Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	64,46 %	86%	90%	92%	95%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & KB
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	Angka kematian akibat keracunan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Kesehatan
Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Kesehatan
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

BAPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan: Rasio dokter/penduduk Rasio dokter spesialis/penduduk Rasio tenaga kesehatan /penduduk	32/100.000 5/100.000 38/100.000	25 5 38	30 5 38	35 5 39	40 5 40	Dinas Kesehatan
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI).	5/100.000	turun	turun	turun	turun	Dinas Kesehatan

TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS (7 target dan 21 indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SDSMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga	
	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	92	95	97	98	99		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	68	70	75	80	97		
	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.		naik	naik	naik	naik		
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga	
Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga	

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat.	78%	86%	87%	90%	97%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga
	APM SMP/MTs/ sederajat;	76%	84%	86%	88%	97%	
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	96,00	turun	turun	turun	Turun	Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga
Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	Proporsi sekolah dengan akses ke listrik.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga
	Proporsi sekolah dengan akses ke internet untuk tujuan pengajaran.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Proporsi sekolah dengan akses ke komputer untuk tujuan pengajaran.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Proporsi sekolah dengan akses ke infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Proporsi sekolah dengan akses ke air minum layak.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Proporsi sekolah dengan akses ke fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Pada tahun 2030, Secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga
	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	-	terdata	terdata	terdata	terdata	

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

negara kurang berkembang, dan negaraberkembang kepulauan kecil.							
--	--	--	--	--	--	--	--

TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER (6 target dan 17 indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas PMD & P3A	
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas PMD & P3A	
	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	2/100	2/100	2/100	2/100	2/100	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah (DPRD Kabupaten)	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah diepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & KB
	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Perlu kajian					
Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Komunikasi dan Informasi

BAPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TUJUAN 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (8 target dan 28 indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Blm didata	naik	naik	naik	naik	Dinas PU & Penataan Ruang, Pertanahan & Kawasan Pemukiman	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	52,05	naik	naik	naik	naik		
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas PU & Penataan Ruang, Pertanahan & Kawasan Pemukiman	
	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	41,50	naik	naik	naik	naik		
	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Jumlah kec yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan dan komunal.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dgn mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas PU & Penataan Ruang, Pertanahan & Kawasan Pemukiman	
	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global							
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Tingkat <i>water stress</i> : proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.	Perlu kajian	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam RTRW.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas kab/kota.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH
	Jumlah wilayah sungai (WS) yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Perlu kajian	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	DLH
	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH
Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan	Perlu kajian	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	DLH	

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

	pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.						
Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH
	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH
	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH
Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Perlu kajian	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	
	Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi	-	terdata	terdata	terdata	terdata

TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU (3 Target dan 5 Indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Rasio elektrifikasi	-	terdata					
	Konsumsi listrik per kapita	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Rasio penggunaan gas rumah tangga	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	Bauran energi terbarukan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energy di tingkat global sebanyak dua kali lipat	Intensitas energi primer.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		

TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (8 Target & 21 Indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDB perkapita.							Bappelitbang
	PDB per kapita							Bappelitbang
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun							
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Persentase tenaga kerja formal	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Persentase akses layanan keuangan formal UMKM	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		
Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama	Upah rata-rata per jam pekerja	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Tingkat pengangguran terbuka	7,81	turun	turun	turun	turun		
	Persentase setengah pengangguran	-	turun	turun	turun	turun		

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

nilainya							
Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Pariwisata & Kebudayaan
	Jumlah wisatawan mancanegara	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah devisa sektor pariwisata	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (15 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & KB

TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (5 Target & 10 Indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Kondisi mantap jalan nasional	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	PU	
	Jumlah pelabuhan strategis	1	1	1	1	1		
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		
Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		
Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara	Proporsi anggaran riset pemerintah.	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi rumah tangga terlayani mobile broadband	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Proporsi individu yang menggunakan Internet	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	

TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN (4 Target & 14 Indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Koefisien Gini	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Bappelitbang	
	Tingkat kemiskinan	15%	turun	turun	turun	turun		
	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Jumlah Desa Tertinggal	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Jumlah Desa Mandiri	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	-	terdata	terdata	terdata	terdata		

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	Indeks Kebebasan Sipil.		terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	
	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Bappelitbang
Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik	Ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	-	terdata	terdata	terdata	terdata	

TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN (6 Target & 12 Indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas PU & Penataan Ruang, Pertanahan &	

BAPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

pelayanan dasar perkotaan.							Kawasan Pemukiman
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terdapat menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas PU & Penataan Ruang, Pertanahan & Kawasan Pemukiman
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.		terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan.		terdata	terdata	terdata	terdata	
Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukkan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	BPBD
	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	BPBD

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	BPBD
	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	BPBD
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	Proporsi ruang terbuka hijau untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Blm terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	

TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGUNGJAWAB (6 Target & 9 Indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU. (perlu di tinjau)	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH	
	Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH	
	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	43%	turun	turun	turun	turun	DLH	

BAPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	63 %	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH
Mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	

TUJUAN 13 : PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (2 Target & 3 Indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN				Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020	

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah.		terdata	terdata	terdata	terdata	BPBD
	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		terdata	terdata	terdata	terdata	BPBD
Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	Jumlah kecamatan yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah, mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, system individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.	Belum terkurikulum	Masuk kurikulum	Masuk kurikulum	Masuk kurikulum	Masuk kurikulum	BPBD

TUJUAN 14 : EKOSISTEM LANJUTAN (7 Target dan 9 Indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.	-	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	DLH	
Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	-	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	DLH	
Pada tahun 2020, secara efektif	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Perikanan	

BAPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dlm waktu singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya	biologis yang aman.						
Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 % wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah yang tersedia	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Perikanan
Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	Persentase kepatuhan usaha	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Meningkatkan pengetahuan ilmiah,	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan	-	terdata	terdata	terdata	terdata	

BAPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang	untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.						
Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji	
	Jumlah kecamatan dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah nelayan yang terlindungi.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	

TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN (6 Target dan 9 Indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN				Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan		terdata	terdata	terdata	terdata	DLH

BAPPELITRANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH
Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH
Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan SD genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	-	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	DLH
Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan kehati dalam perencanaan daerah, proses pembangunan, strategi & penganggaran	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH
	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH
Memobilisasi dan meningkatkan SD keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH
Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH
	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	DLH

TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (9 Target & 33 Indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun.	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan satu tahun terakhir.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala	Proporsi anak 1-14 tahun yg mengalami hukuman fisik/agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Prevalensi kekerasan terhadap anak L&P.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Proporsi L&P muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Belum dikaji	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	
	Indeks Persepsi Korupsi (IPK).	Belum dikaji	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Pemerintah Daerah.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Pemerintah Daerah.	C	naik	naik	naik	naik	
	Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Pemerintah Daerah.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Ess I & II).	-	terdata	terdata	terdata	terdata	

BAPPELITRANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

	Indeks Lembaga Demokrasi.	Belum dikaji	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	
	Indeks Kebebasan Sipil.	Belum dikaji	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	
	Indeks Hak-hak Politik.	Belum dikaji	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	49 %	naik	naik	naik	Naik	
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	-	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	
	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah kepemilikan sertifikat PPID.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. (perlu di tinjau)	-	terdata	terdata	terdata	terdata	

TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN (6 Target & 19 Indikator)

TARGET	INDIKATOR	THN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019	2020		

BAPPELITRANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.						
	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang thn 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi (teknologi informasi dan komunikasi).	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	as Komunikasi dan Informasi
	Persentase kecamatan 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020	Pertumbuhan ekspor produk non migas	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek KPBU, transaksi proyek KPBU dan dukungan pemerintah.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas utk negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Jumlah indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	
	Review Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	Belum dikaji	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji	

BAPELITRANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
Meningkatkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada PD.	-	terdata	terdata	terdata	terdata	Dinas Komunikasi dan Informasi	
	Persentase PD yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan atau Pranata Komputer.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS.	Belum dikaji	terkaji	terkaji	terkaji	terkaji		
	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		
	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer PD.	-	terdata	terdata	terdata	terdata		

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

2017

MATRIKS 2 SDGS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2017	2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR : Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.									
PROGRAM : Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun									
Kegiatan 1. Pemberian beasiswa pada anak sekolah yang putus sekolah dalam BDT	Jumlah anak yang menerima beasiswa	org	terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		Dinas Pendidikan
Kegiatan 2. Pemberian beasiswa anak asuh PEMDA	Jumlah anak yang menerima beasiswa	Org	terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		
Kegiatan 3. Pemberian beasiswa anak berprestasi	Jumlah anak yang menerima beasiswa	Siswa	120	120	120	120	120	2.250.000.000	DAU Dinas Pendidikan
PROGRAM : Upaya Kesehatan Masyarakat									
Kegiatan 1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas Jaringannya	Presentase Pelayanan Pasien miskin	%	75	78	80	85	90	4.250.000.000	DAU Dinas Kesehatan
PROGRAM : Obat dan Perbekalan Kesehatan									
Kegiatan 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat untuk kesehatan	%	100	100	100	100	100	6.463.820.000	DAU Dinas Kesehatan
PROGRAM : Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Kecil Menengah									

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat	klpk	terdata	terdata	terdata	terdata	terdata		DAU	Disperindakop
PROGRAM : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan										
Kegiatan 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jlh desa terbaik yg mengikuti kegiatan lomba desa tingkat kecamatan dan provinsi	Desa	1	1	1	1	1	375.000.000	DAU	BPMD
PROGRAM : pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya										
Kegiatan 1. Pengadaan sarana dan prasarana berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga penerima manfaat	KPM	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata			Dinsos
PROGRAM : peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang mampu										
Kegiatan 1. Lantainisasi, atapnisasi dan dindingnisasi bagi keluarga prasejahtera	Jumlah keluarga penerima manfaat	KPM	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata			Dinsos
PROGRAM : peningkatan kesejahteraan petani										
Kegiatan 1. Peningkatan kemampuan petani	Jumlah petani yang mendapat bimbingan teknis	org	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata		DAU	Dinas Pertanian
PROGRAM : pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir										
Kegiatan 1. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah pesisir	Jlh nelayan yang menerima manfaat	org	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata		DAU	Perikanan
PROGRAM : Pembangunan Jalan dan Jembatan										
Kegiatan 1. Pembangunan Jalan Kehun Desa	Jlh jalan usaha tani	Mtr	3750	20.000	20.000	20.000	20.000	30.887.152.000	DAU	Distanak
PROGRAM : Perencanaan Sosial dan Budaya										
Kegiatan 1. Penanggulangan Kemiskinan	Jlh dok. RAD-SPKD	Dok	1	1	1	1	1	200.000.000	DAU	Bappelitbang

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi.										
PROGRAM : Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1. Pembangunan IPAL Komunal + SR	Jlh IPAL yang dibangun		Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata		DAU	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2. Pembangunan Tanki Septictank Komunal	Jlh Tanki Septictank yang terbangun		Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata		DAU	
PROGRAM : Pemberdayaan Lansia										
Kegiatan 1 : Bantuan Obat-obatan	Jumlah Lansia yang menerima bantuan	org	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata		DAU	Dinas Sosial
INDIKATOR : Jumlah penduduk PBI melalui JKN/KIS.										
PROGRAM : Bantuan dan Jaminan Sosial										
Kegiatan 1 : Fasilitas dan Koordinasi Pendampingan Program PBI										
PROGRAM : Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	Presentase penyelenggaraan JKN	%	100	100	100	100	100		DAU	Dinas Sosial
INDIKATOR : Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.										
PROGRAM : Bantuan dan Jaminan Sosial										
Kegiatan 1 : Fasilitas dan Koordinasi Pendampingan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Presentase pendampingan prog. jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	%	100	100	100	100	100	3.000.000.000	DAU	Dinas Sosial
INDIKATOR : Jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.										
PROGRAM : pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social										
Kegiatan 1 : Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang	Jlh sarana dan prasarana penyandang cacat dan lansia	unit	1	1	1	1	1	2.250.000.000	DAU	Dinsosnakertrans

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

cacat dan lansia												
PROGRAM : Perbaikan Gizi Masyarakat												
Kegiatan 1 : Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin	%	70	75	80	85	90	900.000.000	DAU	Dinkes		
INDIKATOR : Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat.												
PROGRAM : Bantuan dan Jaminan Sosial												
Kegiatan 1 : Fasilitas dan Koordinasi Pendampingan Program keluarga harapan (PKH)	Jlh fasilitas dan pelaksanaan koordinasi PKH	keg	1	1	1	1	1	1.079.679.000	DAU	DinSosnakertrans		
PROGRAM : Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan pelayanan peserta JKN	%	85	90	92	95	95	4.400.000.000	DAU	Dinkes		
INDIKATOR : Persentase/jumlah Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.												
PROGRAM : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak												
Kegiatan 1 : Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu	Cakupan pertolongan persalinan bagi ibu	%	100	100	100	100	100	460.000.000	DAU	Dinkes		
Kegiatan 2 : Perawatan Secara berkala bagi Ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	460.000.000	DAU	Dinkes		
INDIKATOR : Persentase/jumlah anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.												
PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita												
Kegiatan 1 : Peningkatan Kesehatan Anak	Deteksi dini tumbuh kembang anak	%	93	93	94	95	97	460.000.000	DAU	Dinkes		
INDIKATOR : Jumlah/Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.												

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Kesehatan Reproduksi Remaja										
Kegiatan 1: Pemeriksaan kesehatan remaja	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	%	32	39	46	53	60	480.000.000	DAU	Dinkes
PROGRAM : Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga										
Kegiatan 1 :										
INDIKATOR : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.										
PROGRAM : Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku										
Kegiatan 1 : Pembangunan Jaringan Air Minum Desa	Jlh kecamatan penerima manfaat	kec	7	7	7	7	7	10.000.000	DAU	PU-KIMPRASWIL
Kegiatan 2 : Pemeliharaan Air Minum	Persentase pemeliharaan air mjinum	%	100	100	100	100	100			
PROGRAM : Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1 : Pengawasan Kualitas Air Bersih	Persentase pengawasan kualitas air	%	100	100	100	100	100		DAU	PU-KIMPRASWIL
Kegiatan 2 : Pengawasan Depot Air Minum	Persentase pengawasan depot air	%	100	100	100	100	100		DAU	PU-KIMPRASWIL
INDIKATOR : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.										
PROGRAM : Pengembangan Perumahan dan Permukiman										
Kegiatan 1. Pembangunan IPAL Komunal + SR	Jlh Pembangunan IPAL dan SR	unit	20	22	24	26	28	12.921.500.000	DAK	PU-KIMPRASWIL
Kegiatan 2. Pembangunan Tanki Septictank Komunal	Jlh Tanki Septictank yang terbangun		Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Dihitung	DAU	PU-KIMPRASWIL
PROGRAM : Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1 : Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU dan TPM)			Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Dihitung	DAU	
Kegiatan 2 : Pengawasan Sanitasi Permukiman			Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Dihitung	DAU	

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat.										
PROGRAM : Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun										
Kegiatan 1. Pemberian beasiswa pada anak sekolah SD yang putus sekolah dalam BDT	jumlah anak SD yang menerima beasiswa	org	terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	Dihitung	DAU	Dinas Pendidikan
INDIKATOR : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat.										
PROGRAM : Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun										
Kegiatan 1. Pemberian beasiswa pada anak sekolah SMP yang putus sekolah dalam BDT	jumlah anak SMP yang menerima beasiswa	org	terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	Dihitung	DAU	Dinas Pendidikan
INDIKATOR : Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran.										
PROGRAM : Pelayanan Administrasi Kependudukan										
Kegiatan 1 : Penerbitan Dokumen Kependudukan	jumlah Dokumen Kependudukan	Dok	1	1	1	1	1	100.000.000	DAU	Duncapil
INDIKATOR : Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (BDT = 5.134)										
PROGRAM : Pengembangan Perumahan dan Permukiman										
Kegiatan 1 : Perluasan Permukiman Masyarakat	jlh perluasan pemukiman masyarakat	meter	terdata	terdata	terdata	terdata	terdata	Dihitung	DAU	PU
INDIKATOR : Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
PROGRAM : Penanggulangan Bencana berbasis Masyarakat										
Kegiatan 1 : Pembangunan Posko Siaga Darurat	jlh posko siaga darurat	unit	2	2	2	2	2	826.500.000	DAU	BPBD
PROGRAM : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Kegiatan 1 : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	jlh RT penerima bantuan bencana	Kel	50	250	250	250	250	2.640.020	DAU	BPBD

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi korban Bencana	Presentase pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi korban Bencana	%	100	100	100	100	100	5.109.273.000	DAU	BPBD
INDIKATOR : Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.										
PROGRAM : perencanaan pembangunan daerah rawan bencana										
Kegiatan 1 : Penyusunan dan Pengadaan Buku Profil Daerah Rawan Bencana	Jlh buku Profil Daerah Rawan Bencana	Ekp	0	100	0	75	175	189.077.000	DAU	BPBD
INDIKATOR : Jumlah Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.										
PROGRAM : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1 : Penanganan masalah-masalah strategis menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa	Jlh RTS penerima bantuan korban bencana	kel	50	250	250	250	250	2.640.020.000	DAU	BPBD
INDIKATOR : Jumlah Pendampingan psikososial korban bencana sosial										
PROGRAM : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1 : pengadaan Tempat penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dari Ancaman Bencana alam	Jlh tempat penampungan dan evakuasi	lok	2	2	2	2	2	826.500.000	DAU	BPBD
INDIKATOR : Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.										
PROGRAM : Penguatan Kelembagaan										
Kegiatan 1 : Pembentukan dan Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Jlh kegiatan Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Keg.	1	2	2	2	2	431.550.000	DAU	BPBD
INDIKATOR : Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi										

BAPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : perencanaan pembangunan daerah rawan bencana										
Kegiatan 1 : Kegiatan 1 : Penyusunan dan Pengadaan Buku Profil Daerah Rawan Bencana	Jlh buku Profil Daerah Rawan Bencana	Ekp	0	100	0	75	175	189.077.000	DAU	BPED
INDIKATOR : Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah. (Tier II).										
PROGRAM : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Kegiatan 1 : Kegiatan Penyusunan Dokumen strategi pengurangan resiko bencana	Jlh buku Profil Daerah Rawan Bencana	Ekp	0	100	0	75	175	189.077.000	DAU	BPED
INDIKATOR : Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.										
PROGRAM : Perencanaan Sosial dan Budaya										
Kegiatan 1 : Penanggulangan Kemiskinan	Jlh dok RAD-SPKD	Dok	1	1	1	1	1	200.000.000	DAU	Bappelitbang
INDIKATOR : Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah										
PROGRAM : Perencanaan Sosial dan Budaya										
Kegiatan 1 : Penanggulangan Kemiskinan	Jlh dok RAD-SPKD	Dok	1	1	1	1	1	200.000.000	DAU	Bappelitbang

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2017	2018	2019	2020	2021				
INDIKATOR : Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).										
PROGRAM : Peningkatan mutu dan Keamanan pangan										
Kegiatan 1. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Keg	1	1	1	1	1	250.000.000	DAU	Ketahanan Pangan
INDIKATOR : Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.										
PROGRAM : Perbaikan Gizi Masyarakat										
Kegiatan 1. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin	%	70	75	80	85	90	900.000.000	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.										
PROGRAM : Peningkatan mutu dan Keamanan pangan										
Kegiatan 1. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Keg	1	1	1	1	1	250.000.000	DAU	Ketahanan Pangan
INDIKATOR : Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.										
PROGRAM : Peningkatan Ketahanan Pangan										

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Ketersediaan pangan utama	Tersedianya pangan utama	ton	15	15	15	15	20	3.339.645.000	DAU	Ketahanan Pangan
INDIKATOR : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.										
PROGRAM : Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1. Peningkatan Kesehatan Anak	Deteksi Dini Tubuh kembang anak balita dan anak pra sekolah	%	93	93	94	94	95	460.000.000	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita.										
PROGRAM : Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1. Peningkatan Kesehatan Anak	Deteksi Dini Tubuh kembang anak balita dan anak pra sekolah	%	93	93	94	94	95	460.000.000	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Prevalensi anemia pada ibu hamil.										
PROGRAM : Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Prevalensi anemia gizi pada ibu hamil dan bayi	%	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	470.000.000	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.										
PROGRAM : Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin	cakupan ASI eksklusif	%	59	61	62	64	65	215.000.000	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.										
PROGRAM : Peningkatan Ketahanan Pangan										
Kegiatan 1. Ketersediaan pangan utama	Tersedianya pangan utama	ton	15	15	15	15	20	250.000.000	DAU	KKP

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Pengembangan Perikanan Tangkap										
Kegiatan 1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah pendamping desa untuk kelompok nelayan	org	terdata	terdata	terdata	terdata	Terdata	dihitung	DAU	Perikanan
INDIKATOR : Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).										
PROGRAM : peningkatan kesejahteraan petani										
Kegiatan 1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah petani yang mendapat bimbingan teknis	org	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata	Terdata		DAU	Dinas Pertanian
INDIKATOR : Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam.										
PROGRAM : Peningkatan Produksi Hasil Pertanian										
Kegiatan 1. Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan	Jlh klpk tani penerima bibit unggul pertanian	klpk	30	35	40	45	50	1.531.000.000	DAU	Dinas Pertanian
PROGRAM : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian										
Kegiatan 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian dan perkebunan tepat guna	Jlh bantuan sarpras pertanian	unit	34	476	476	476	476	13.907.000.000	DAU	Dinas Pertanian
INDIKATOR : Terlaksananya distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh tani dan nelayan.										
PROGRAM : peningkatan kesejahteraan petani										
Kegiatan 1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Pendapatan petani	Rupiah	dihitung	dihitung	dihitung	dihitung	dihitung	dihitung	DAU	Dinas Pertanian
INDIKATOR : Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu.										
PROGRAM : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian										
Kegiatan 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian dan perkebunan tepat guna										

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Tersalurkannya sarana dan produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan.										
PROGRAM : Peningkatan Produksi Hasil Pertanian										
Kegiatan 1. Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan	Jumlah bantuan bibit unggul pertanian	Sachet/Kg	Cabe 2000 Sachet, jagung 600 Kg	dihitung	DAU	Pertanian				
PROGRAM : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan										
Kegiatan 1. Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Perlu kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji	dihitung	DAU	Pertanian	
INDIKATOR : Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.										
PROGRAM : Peningkatan Produksi Hasil Pertanian										
Kegiatan 1. Pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan	Jumlah bantuan bibit unggul pertanian	Sachet/Kg	Cabe 2000 Sachet, jagung 600 Kg	dihitung	DAU	Pertanian				
INDIKATOR : Terselenggaranya sistem pengembangan, pembinaan, pengawasan dan sertifikasi perbenihan dan perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang efisien di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat di kecamatan.										
PROGRAM : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Pertanian										
Kegiatan 1.	Perlu kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji	dihitung	DAU	Pertanian	
PROGRAM : Peningkatan Ketahanan Pangan										
Kegiatan 1. Ketersediaan energi dan pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	0	90	90	90	90	dihitung	DAU	Pertanian
INDIKATOR : Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.										

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan											
Kegiatan 1. Pembelian dan Peridistribusian Varietas Ternak				Sapi 190, ayam 1000,	Sapi 190, ayam 1000,	Sapi 190, ayam 2000,	Sapi 190, ayam 2500,				
	Jumlah Varietas hewan	ekor	60 sapi, Ayam 1000.	1000, kambing 75	1000, kambing 75	2000, kambing 75	2500, kambing 75	14.590.000	DAU	Pertanian, Kelautan Perikanan	Pangan, dan

TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2017	2018	2019	2020	2021				
INDIKATOR : Angka Kematian Ibu										
PROGRAM : Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1. Peningkatan kesehatan masyarakat	Jlh puskesmas yg melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	unit	8	8	8	8	8	400.000.000	DAU	Dinkes
PROGRAM : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak										
Kegiatan 1. Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu	Cakupan ibu hamil dgn komplikasi yg ditangani	%	65	65	70	75	80	420.000.000	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.										
PROGRAM : Standarisasi Pelayanan Kesehatan										

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes	
INDIKATOR : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.											
PROGRAM : Standarisasi Pelayanan Kesehatan											
Kegiatan 1. Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes	
INDIKATOR : Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.											
PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita											
Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan	Ratioperawat penduduk	272/100	245	250	265	272	272	272	500.000.000	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.											
PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita											
Kegiatan 1. Peningkatan pelayanan kesehatan	Deteksi dini tumbuh kembang anak balita	%	93	93	94	94	95	460.000.000	DAU	Dinkes	
PROGRAM : Standarisasi Pelayanan Kesehatan											
Kegiatan 1. Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes	
INDIKATOR : Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.											
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
Kegiatan 1. Pengadaan Sertifikat Bayi yang telah di Imunisasi Dasar Lengkap	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes	
PROGRAM : Standarisasi Pelayanan Kesehatan											
Kegiatan 1. Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes	

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Persentase kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.										
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Juru Imunisasi	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Pengadaan Sertifikat Bayi yang telah di Imunisasi Dasar Lengkap	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.										
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Peningkatan Kapasitas Petugas HIV	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Prevalensi HIV pada populasi dewasa.										
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Peningkatan Kapasitas Petugas HIV	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Insiden Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk.										
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Peningkatan Kapasitas Petugas TB	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Kejadian Malaria per 1000 orang.										
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Peningkatan Kapasitas petugas Malaria	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Jumlah kecamatan dengan eliminasi Malaria.										
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Peningkatan Kapasitas petugas Malaria	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.										
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B										
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobati.										
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Bina Desa/ Program Kusta	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Peningkatan Kapasitas Petugas TB dan Kusta	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta.										
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1. Bina Desa/ Program Kusta	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Peningkatan Kapasitas Petugas TB dan Kusta	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis 100%.										
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis.										
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.										
PROGRAM : Upaya Kesehatan masyarakat										
Kegiatan 1. Penyuluhan dan Promosi Kesehatan Kawasan Tanpa Rokok	Persentase kebijakan kawasan tanpa rokok	%	50	75	80	95	100	220.000.000	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Prevalensi tekanan darah tinggi.										
PROGRAM : Upaya Kesehatan masyarakat										

BAPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Peningkatan kesehatan masyarakat	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.										
PROGRAM : Peningkatan kesehatan masyarakat										
Kegiatan 1. Peningkatan kesehatan masyarakat	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara.										
PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Angka kematian dari percobaan bunuh diri.										
PROGRAM : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
Kegiatan 1.	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.										
PROGRAM : Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya										
Kegiatan 1. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Jumlah penyalahgunaan narkoba yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan.										
PROGRAM : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
Kegiatan 1. Kegiatan penyuluhan Bahaya Narkoba	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Jumlah yang menyelesaikan program rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.										
PROGRAM : Program Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan										

BAPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Pengadaan sarana dan prasarana rehabilitasi	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
PROGRAM : Program Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan										
Kegiatan 1. Pengadaan sarana dan prasarana rehabilitasi	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.										
PROGRAM : pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social										
Kegiatan 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu										
PROGRAM : pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social										
Kegiatan 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Prevalensi penyalahgunaan narkoba.										
PROGRAM : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
Kegiatan 1. Kegiatan penyuluhan Bahaya Narkoba	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.										
PROGRAM : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
Kegiatan 1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sehat											
INDIKATOR : Proporsi pasangan usia subur (umur 15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Metneed KB/ Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).											
PROGRAM : Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga											
Kegiatan 1.	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes	
INDIKATOR : Jumlah Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin.											
PROGRAM : Keluarga Berencana											
Kegiatan 1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes	
INDIKATOR : Jumlah Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)											
PROGRAM : Keluarga Berencana											
Kegiatan 1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes	
INDIKATOR : Jumlah Total Fertility Rate (TFR).											
PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita											
Kegiatan 1. Peningkatan kesehatan anak	Deteksi dini tumbuh kembang anak	%	93	93	94	94	95	460.000.000	DAU	Dinkes	
PROGRAM : Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya											
Kegiatan 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes	
INDIKATOR : Unmet need pelayanan kesehatan.											
PROGRAM : Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya											

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.										
PROGRAM : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan										
Kegiatan 1. Kemitraan Asuransi kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan peserta JKN	%	86	90	92	95	95	4.400.000.000	dau	DINKES
INDIKATOR : Jumlah Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).										
PROGRAM : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan										
Kegiatan 1. Kemitraan Asuransi kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan peserta JKN	%	86	90	92	95	95	4.400.000.000	dau	DINKES
INDIKATOR : Angka kematian akibat keracunan.										
PROGRAM : Pengawasan Obat dan Makanan										
Kegiatan 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan bahan berbahaya	Presentase apotek dan toko obat yg diawasi	%	100	100	100	100	100	375.000.000	dau	DINKES
INDIKATOR : Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.										
PROGRAM : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
Kegiatan 1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.										
PROGRAM : Obat dan Perbekalan Kesehatan										
Kegiatan 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat perkapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar.	13.000/kapita	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	6.463.820.000	DAU	Dinkes

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Pengawasan Obat dan Makanan										
Kegiatan 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan bahan berbahaya	Presentase apotek dan toko obat yg diawasi	%	100	100	100	100	100	375.000.000	dau	DINKES
INDIKATOR : Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										
PROGRAM : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan	Perlu kajian		dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes

TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2017	2018	2019	2020	2021				
INDIKATOR : Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.										
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
Kegiatan 1. APK SD/MI, SMP/MI	Dihitung	%	95	97	98	99	99	dihitung	DAU	Pendidikan
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
Kegiatan 1. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah pelaksanaan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	org	20	20	30	40	50	150.000.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.										

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Manajemen Pelayanan Pendidikan										
Kegiatan 1. Pembuatan kartu NISN	Jlh Siswa yg memiliki kartu NISN	Siswa	-	-	1225	1523	1655	15.250.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.										
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
Kegiatan 1. APK SD/MI	Dihitung	%	95	97	98	99	99	dihitung	DAU	Pendidikan
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
Kegiatan 1. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kopentesi	Jumlah pelaksanaan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kopentesi	org	20	20	30	40	50	150.000.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.										
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
Kegiatan 1. APK SMP/MTs/ Sederajat	Dihitung	%	68	70	75	80	97	dihitung	DAU	Pendidikan
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
Kegiatan 1. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kopentesi	Jumlah pelaksanaan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kopentesi	org	20	20	30	40	50	150.000.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.										
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
Kegiatan 1. SD/MI	Dihitung	Thn	6	6	6	6	6	dihitung	DAU	Pendidikan
PROGRAM : Manajemen Pelayanan Pendidikan										

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1:										
INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).										
PROGRAM : Pendidikan Anak Usia Dini										
Kegiatan 1. Pembinaan dan bimbingan	Jumlah pelaksanaan pelatihan PTK (tutor) SPS/KB TK	keg	200	205	210	215	220	435.000.000	DAU	Pendidikan
Kegiatan 2. Peningkatan mutu tenaga	Jumlah pelaksanaan pelatihan PTK (tutor) SPS/KB TK	keg	200	205	210	215	220	435.000.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).										
PROGRAM : Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi										
Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Komunikasi Informatika	Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informasi	org	2	2	2	2	2	80.000.000	DAU	Perhubungan
INDIKATOR : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat.										
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
Kegiatan 1. SD/MI	Dihitung	%	78	86	87	96	97	Dihitung	DAU	Pendidikan
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
Kegiatan 1. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kopetensi	Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kopetensi	org	20	20	20	20	20	150.000.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : APM SMP/MTs/ sederajat										
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
Kegiatan 1. SMP/MTs/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	%	98	99	100	100	100	Dihitung	DAU	Pendidikan

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
Kegiatan 1. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	org	20	20	20	20	20	150.000.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.										
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pendidikan menengah	Penduduk berusia lebih 15 tahun melek huruf	%	0.43	0.65	0.5	0.1	0.1	25.240.350.000	DAU	Pendidikan
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
Kegiatan 1. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	org	20	20	20	20	20	150.000.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Proporsi sekolah dengan akses ke listrik.										
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
Kegiatan 1. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah	Jumlah ruang kelas SD yang di bangun	ruang	28	5	5	5	5	7.149.750.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Proporsi sekolah dengan akses ke internet untuk tujuan pengajaran.										
PROGRAM : Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi										
Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Komunikasi Informatika	Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informasi	org	2	2	2	2	2	80.000.000	DAU	Perhubungan
INDIKATOR : Proporsi sekolah dengan akses ke komputer untuk tujuan pengajaran.										
PROGRAM : Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi										

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Komunikasi Informatika	Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informasi	org	2	2	2	2	2	2	80.000.000	DAU	Perhubungan
INDIKATOR : Proporsi sekolah dengan akses ke infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas.											
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun											
Kegiatan 1. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah	Jumlah ruang kelas SD yang di bangun	ruang	28	5	5	5	5	5	7.149.750.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Proporsi sekolah dengan akses ke air minum layak.											
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun											
Kegiatan 1. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah	Jumlah ruang kelas SD yang di bangun	ruang	28	5	5	5	5	5	7.149.750.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Proporsi sekolah dengan akses ke fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin.											
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun											
Kegiatan 1. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah	Jumlah ruang kelas SD yang di bangun	ruang	28	5	5	5	5	5	7.149.750.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Proporsi sekolah dengan akses ke fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).											
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun											
Kegiatan 1. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah	Jumlah ruang kelas SD yang di bangun	ruang	28	5	5	5	5	5	7.149.750.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik											
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	org	20	20	20	20	20	20	150.000.000	DAU	Pendidikan

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Pendidikan Anak Usia Dini											
Kegiatan 1. Pelatihan Kompetensi Tenaga	Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	org	20	20	20	20	20	20	150.0000.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik											
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	org	20	20	20	20	20	20	150.0000.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik											
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	org	20	20	20	20	20	20	150.0000.000	DAU	Pendidikan

TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2017	2018	2019	2020	2021				
INDIKATOR : Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan										
PROGRAM : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan										
Kegiatan 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jlh Organisasi perempuan yang terbina	Organisasi	1	0	0	0	0	10.647.500	DAU	PMD

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Persentase peran ibu rumah tangga	%	50	50	50	50	50	26.262.500	DAU	PMD
INDIKATOR : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian										
Kegiatan 2. Perlu Kajian										
PROGRAM :										
Kegiatan 1.										
Kegiatan 2.										
INDIKATOR : Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.										
PROGRAM :										
Kegiatan 1.										
Kegiatan 2.										
PROGRAM :										
Kegiatan 1.										
Kegiatan 2.										
INDIKATOR : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir										

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM ;									
Kegiatan 1.									
Kegiatan 2.									
PROGRAM ;									
Kegiatan 1.									
Kegiatan 2.									
INDIKATOR : Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.									
PROGRAM ;									
Kegiatan 1.									
Kegiatan 2.									
PROGRAM ;									
Kegiatan 1.									
Kegiatan 2.									
INDIKATOR : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun									
PROGRAM ;									
Kegiatan 1.									
Kegiatan 2.									
PROGRAM ;									
Kegiatan 1.									

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2.											
INDIKATOR : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.											
PROGRAM :											
Kegiatan 1.											
Kegiatan 2.											
PROGRAM :											
Kegiatan 1.											
Kegiatan 2.											
INDIKATOR : Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun											
PROGRAM :											
Kegiatan 1.											
Kegiatan 2.											
PROGRAM :											
Kegiatan 1.											
Kegiatan 2.											
INDIKATOR : Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)											
PROGRAM :											
Kegiatan 1.											
Kegiatan 2.											

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM :										
Kegiatan 1.										
Kegiatan 2.										
INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat										
PROGRAM : Program Pendidikan Menengah										
Kegiatan 1. Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/Paket C	%	91.23	97.66	98.01	96.41	98.78	25.240.350.000	DAU	Pendidikan
Kegiatan 2. Pendidikan Menengah	APM/ SMA/SMK/Paket C	%	88.98	96.55	97.65	98.20	98.83	25.240.350.000	DAU	Pendidikan
INDIKATOR : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah (DPRD Kabupaten)										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
PROGRAM :										

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.										
PROGRAM : Perlu Kajian										

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu Kajian	Perlu Kajian	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
--------------------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

TUJUAN 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2017	2018	2019	2020	2021				
INDIKATOR : Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.										
PROGRAM : Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1. Inspeksi Sanitasi PDAM/ Jaringan perpipaan dan Depot Air Minum	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas.	%	69	75	80	85	90	300.000.000	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Inspeksi Sanitasi PDAM/ Jaringan perpipaan dan Depot Air Minum	Persentase kualitas air minum yang memiliki syarat kesehatan	%	68.7	70	75	80	90	270.000.000	DAU	Dinkes
PROGRAM : Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Persentase keluarga yang memenuhi syarat kesehatan	%	40	65	75	80	100	295.000.000	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Persentase keluarga yang menggunakan jamban yg memenuhi syarat kesehatan	%	35	60	65	70	80	325.000.000	DAU	Dinkes

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.										
PROGRAM : Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1. Inspeksi Sanitasi PDAM/ Jaringan perpipaan dan Depot Air Minum	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas.	%	69	75	80	85	90	300.000.000	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Inspeksi Sanitasi PDAM/ Jaringan perpipaan dan Depot Air Minum	Persentase kualitas air minum yang memiliki syarat kesehatan	%	68.7	70	75	80	90	270.000.000	DAU	Dinkes
PROGRAM : Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Persentase keluarga yang memenuhi syarat kesehatan	%	40	65	75	80	100	295.000.000	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Persentase keluarga yang menggunakan jamban yg memenuhi syarat kesehatan	%	35	60	65	70	80	325.000.000	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
PROGRAM : Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
PROGRAM: Pengembangan Lingkungan Sehat										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes
INDIKATOR : Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.										

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Pengembangan Lingkungan Sehat											
Kegiatan 1.Perlu Kajian	Dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes							
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes							
PROGRAM : Pengembangan Lingkungan Sehat											
Kegiatan 1.Perlu Kajian	Dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes							
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes							
INDIKATOR : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.											
PROGRAM : Pengembangan Lingkungan Sehat											
Kegiatan 1.Perlu Kajian	Dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes							
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes							
PROGRAM : Pengembangan Lingkungan Sehat											
Kegiatan 1.Perlu Kajian	Dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes							
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dihitung	DAU	Dinkes							
INDIKATOR : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STEM											
PROGRAM :											
Kegiatan 1.											
Kegiatan 2.											
PROGRAM :											
Kegiatan 1.											

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2.											
INDIKATOR : Jumlah kec yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan dan komunal.											
PROGRAM :											
Kegiatan 1.											
Kegiatan 2.											
PROGRAM :											
Kegiatan 1.											
Kegiatan 2.											
INDIKATOR : Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.											
PROGRAM : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah											
Kegiatan 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah	Ketersediaan prasarana dan sarana air limbah tepat fungsi	Keg	1	1	1	1	1	1.125.000.000	DAU	BLH	
Kegiatan 2. Pengadaan tanah untuk instalansi pengolahan lumpur tinja (IPLT)	Jlh Ha tanah untuk bangunan IPLH	Ha	1	1	0	0	0	375.000.000	DAU	BLH	
PROGRAM : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah											
Kegiatan 1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah	Ketersediaan sarana dan prasarana tepat guna	Keg	1	1	1	1	1	1.525.000.000	DAU	BLH	
Kegiatan 2. Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengelolalan air limbah	Jumlah orang petugas pengolah limbah	org	5	10	10	12	15	1.262.000.000	DAU	BLH	
INDIKATOR : Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.											

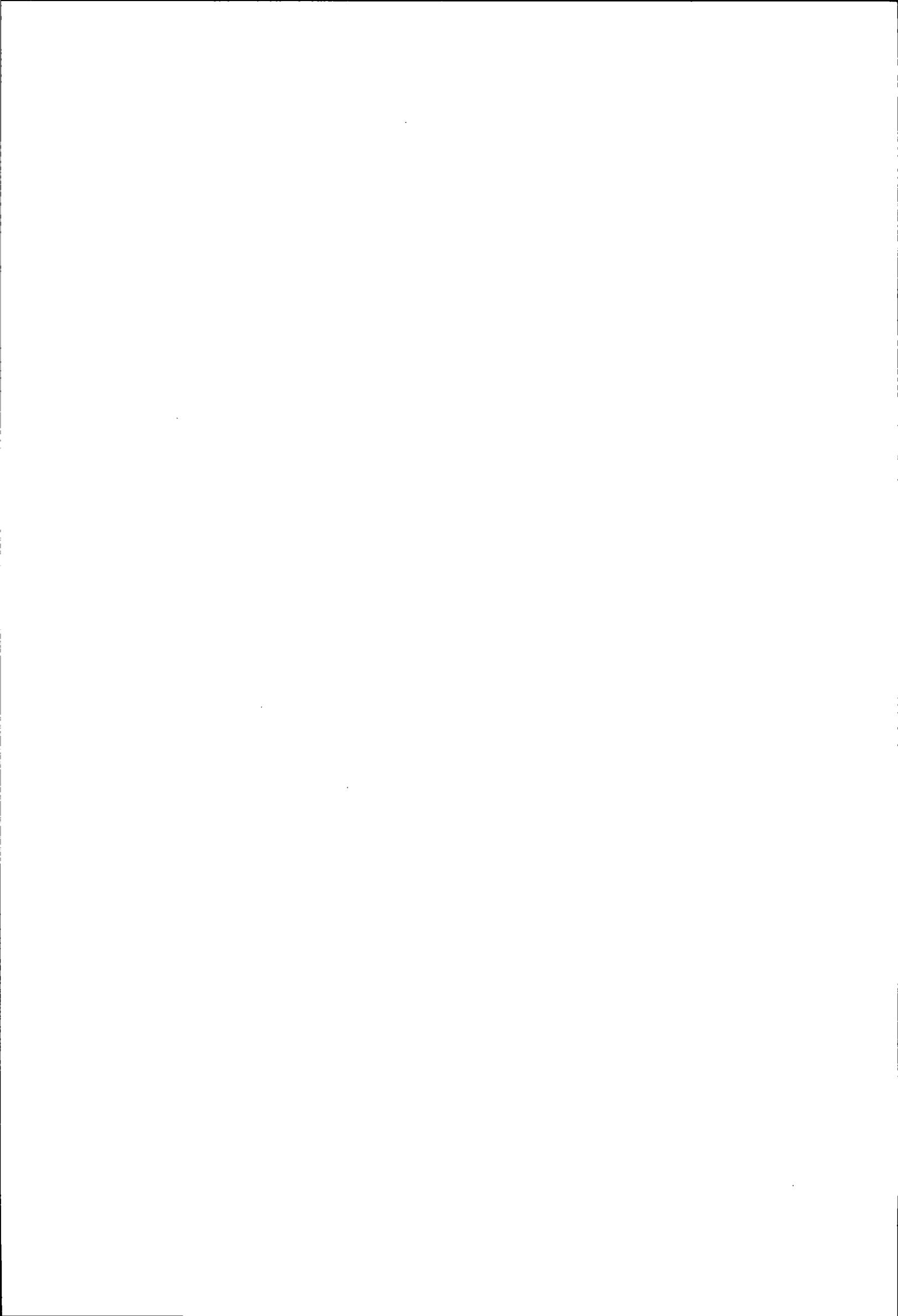
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
PROGRAM : Perlu dikaji									
Kegiatan 1. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji		
Kegiatan 2. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji		
INDIKATOR : Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.									
PROGRAM : Perlu dikaji									
Kegiatan 1. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji		
Kegiatan 2. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji		
PROGRAM : Perlu dikaji									
Kegiatan 1. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji		
Kegiatan 2. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji		
INDIKATOR : Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu									
PROGRAM : Perlu dikaji									
Kegiatan 1. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji		
Kegiatan 2. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji		
PROGRAM : Perlu dikaji									
Kegiatan 1. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji		

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah										
PROGRAM : Perlu dikaji										
Kegiatan 1. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
PROGRAM : Perlu dikaji										
Kegiatan 1. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu dikaji	Dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.										
PROGRAM : Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.										
Kegiatan 1. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Jlh kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	unit	1	1	1	1	1	2.538.000.000	DAU	PU
Kegiatan 2. Pemeliharaan dan optimalisasi jaringan irigasi	Jumlah kegiatan Pemeliharaan dan optimalisasi jaringan irigasi	Keg	20	20	20	20	20	21.793.227.000	DAK	PU
PROGRAM : Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.										
Kegiatan 1. Peningkatan jaringan irigasi	Jumlah keg. Peningkatan jaringan irigasi	Keg.	20	20	20	20	20	127.119.620.000	DAK	PU
Kegiatan 2. Peningkatan jaringan irigasi (pendampin DAK)	dihitung		0	0	0	0	0	dihitung	DAK	PU
INDIKATOR : Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.										
PROGRAM : Perlu Kajian										

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
Kegiatan 2. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
Kegiatan 2. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
INDIKATOR : Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).											
PROGRAM : Perlu Dikaji											
Kegiatan 1. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
Kegiatan 2. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
PROGRAM : Perlu Dikaji											
Kegiatan 1. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
Kegiatan 2. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
INDIKATOR : Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam RTRW.											
PROGRAM : Perlu Dikaji											
Kegiatan 1. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
Kegiatan 2. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
PROGRAM : Perlu Dikaji											
Kegiatan 1. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
Kegiatan 2. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk											
PROGRAM : Perlu Dikaji											
Kegiatan 1. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
Kegiatan 2. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
PROGRAM : Perlu Dikaji											
Kegiatan 1. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
Kegiatan 2. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
INDIKATOR : Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas kab/kota.											
PROGRAM : Perlu Dikaji											
Kegiatan 1. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
Kegiatan 2. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
PROGRAM : Perlu Dikaji											
Kegiatan 1. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
Kegiatan 2. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
INDIKATOR : Jumlah wilayah sungai (WS) yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.											
PROGRAM : Perlu Dikaji											
Kegiatan 1. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
Kegiatan 2. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM ; Perlu Dikaji											
Kegiatan 1. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
Kegiatan 2. Perlu Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	PU
INDIKATOR : Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.											
PROGRAM ; Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum											
Kegiatan 1. Pemeliharaan Sarana Air Minum	Jumlah kecamatan yang sarana air minum yg memenuhi standar	Kec	8	8	8	8	8	8	10.000.000.000	DAU	PU
Kegiatan 2. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	unit	22	7	6	6	0	0	88.064.386.000	DAU	PU
INDIKATOR : Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.											
PROGRAM ; Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
PROGRAM ;											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.											
PROGRAM ;											

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.										
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.										
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.										
PROGRAM : Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam										
Kegiatan 1. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	Jumlah unit terumbu karang yang direhabilitasi	unit	125	125	125	125	125	1.983.500.000	DAU	BLH
INDIKATOR : Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.										
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.										
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi										
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Peleaksana
		2017	2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR : Rasio Elektrifikasi									
PROGRAM :									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
PROGRAM :									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Konsumsi listrik per kapita									
PROGRAM :									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
INDIKATOR : Rasio penggunaan gas rumah tangga									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
INDIKATOR : Bauran energi terbarukan.									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
PROGRAM : Perlu Kajian									

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Intensitas energi primer.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									

TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2017	2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR : Laju pertumbuhan PDB perkapita.									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : PDB per kapita										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin										

BAPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Persentase tenaga kerja formal										
PROGRAM :Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja										
Kegiatan 1. Pembangunan Balai latihan Kerja (BLK)	Jumlah BLK	Unit			1			1.500.000.000	DAU	Dinsos
Kegiatan 2. Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Presentase ketersediaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	%			10	20	20	800.000.000	DAU	Dinsos
PROGRAM : Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja										
Kegiatan 1. Pelatihan tenaga pendamping di BLK	Jumlah pendamping BLK sesuai dengan kebutuhan	org			1	2	3	250.000.000	DAU	Dinsos
Kegiatan 2. Pelatihan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Jlh tenaga kerja yang terlatih	org	16	20	25	200	150	526.000.000	DAU	Dinsos
INDIKATOR : Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian										
PROGRAM :Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Persentase akses layanan keuangan formal UMKM										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Upah rata-rata per jam pekerja										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Tingkat pengangguran terbuka										
PROGRAM : Peningkatan kesempatan Kerja										
Kegiatan 1. Penyusunan informasi buras tenaga kerja	Pelatihan pendamping angkatan kerja tenaga survey	Keg.	1	1	1	1	1	150.000.000	DAU	DinSos
Kegiatan 2. Penyebarluasan informasi buras tenaga kerja	Penyelenggaraan bursa tenaga kerja	Keg.	1	1	1	1	1	250.000.000	DAU	DinSos
PROGRAM : Peningkatan kesempatan Kerja										
Kegiatan 1. Pelatihan penyusun data base	Jumlah aparatur yg terlatih menyusun data base	Keg.	1	1	1	1	1	250.000.000	DAU	DinSos
INDIKATOR : Persentase setengah pengangguran										
PROGRAM : Perlu kajian										

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.										
PROGRAM : Perlu kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB										
PROGRAM : Perlu kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah wisatawan mancanegara										
PROGRAM : Perlu kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah kunjungan wisatawan nusantara										
PROGRAM : Perlu kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah devisa sektor pariwisata										

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
Kegiatan 2. Perlu dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
INDIKATOR : Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja									
PROGRAM : Perlu kajian									
Kegiatan 1. Perlu dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
Kegiatan 2. Perlu dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
INDIKATOR : Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.									
PROGRAM :									
Kegiatan 1.	Dikaji								
Kegiatan 2.	Dikaji								
PROGRAM :									
Kegiatan 1.	Dikaji								
Kegiatan 2.	Dikaji								
INDIKATOR : Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)									
PROGRAM :									
Kegiatan 1.	Dikaji								
Kegiatan 2.	Dikaji								
PROGRAM :									



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1.	Dikaji									
Kegiatan 2.	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit										
PROGRAM :										
Kegiatan 1.	Dikaji									
Kegiatan 2.	Dikaji									
PROGRAM :										
Kegiatan 1.	Dikaji									
Kegiatan 2.	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (15 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak										
PROGRAM : Perlu kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan										
PROGRAM : Perlu kajian										

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1: Perlu kajian	Dikaji									
Kegiatan 2: Perlu kajian	Dikaji									

TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI dan INFRASTRUKTUR

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2017	2018	2019	2020	2021				
INDIKATOR : Kondisi Mantap Jalan Nasional										
PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Nasional										
Kegiatan 1: Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2: Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Jumlah pelabuhan strategis										
PROGRAM : Peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan Strategis										
Kegiatan 1: Pembangunan Pelabuhan Strategis	Jumlah pelabuhan strategis	Keg	1	1			1	8.000.000.000		Dinas Perikanan
Kegiatan 2:	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.										
PROGRAM : Perlu kajian										

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. perlu kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. perlu kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur:										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Disperindakop						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Disperindakop						
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Disperindakop						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Disperindakop						
INDIKATOR : Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Disperindakop						

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			DAU	Disperindakop						
INDIKATOR : Proporsi anggaran riset pemerintah											
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji										
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji										

INDIKATOR : Proporsi rumah tangga terlayani mobile broadband											
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji										
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji										
INDIKATOR : Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam											
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji										
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji										
INDIKATOR : Proporsi individu yang menggunakan Internet											
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji										
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji										

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2017	2018	2019	2020	2021				
INDIKATOR : Koefisien Gini										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		Dinas PMD	
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Tingkat kemiskinan										
PROGRAM : Pemberdayaan fakir miskin										
Kegiatan 1. Peningkatan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah KUBE FM yg mendapat pelatihan ketrampilan	klpk	30	30	30	30	30	360.000.000	DAU	Dinsos
Kegiatan 2. Fasilitas berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah KUBE yg mendapat fasilitas manajemen berusaha		75	75	75	75	75	4.500.000.000	DAU	Dinsos
INDIKATOR : Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	dihitung		Dinsos
Kegiatan 2.	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	dihitung		Dinsos

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Jumlah Desa Tertinggal										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			Dinsos
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			Dinsos
INDIKATOR : Jumlah Desa Mandiri										
PROGRAM : Peningkatan Ketahanan Pangan										
Kegiatan 1. Peningkatan ketahanan pangan	Desa Swasembada Pangan	1	1	1	1	1	1	8.000.000.000	DAU	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan.
INDIKATOR : Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			Dinsos
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			Dinsos
INDIKATOR : Indeks Kebebasan Sipil										
PROGRAM : Perlu Kajian										

BAPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Semua SKPD						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Semua SKPD						
INDIKATOR : Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Bagian Hukum						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Bagian Hukum						
INDIKATOR : Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.										

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
INDIKATOR : Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								

TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2017	2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR : Jumlah Rumah tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
INDIKATOR : Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya										

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)

PROGRAM : Perlu Kajian

Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									

INDIKATOR : Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

PROGRAM : Perlu Kajian

Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			BPBD						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			BPBD						

INDIKATOR : Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.

PROGRAM : Perlu Kajian

Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									

INDIKATOR : Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar

PROGRAM : Perlu Kajian

Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									

PROGRAM : Perlu Kajian

Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi ruang terbuka hijau untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									

TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2017	2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR : Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
INDIKATOR : Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang										
PROGRAM : Peningkatan daur ulang sampah										
Kegiatan 1. Peningkatan daur ulang sampah	unit		1	0	0	1	1	dihitung	DAU	BLH
Kegiatan 2. Peningkatan daur ulang sampah	Unit		1	0	0	1	1	dihitung	DAU	BLH
INDIKATOR : Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Disperindakop						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Disperindakop						

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
INDIKATOR : Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
INDIKATOR : Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		Pariwisata						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		Pariwisata						
PROGRAM : Perlu Kajian									

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Pariwisata						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Pariwisata						

TUJUAN 13 : PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2017	2018	2019	2020	2021				
INDIKATOR : Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana Tingkat Daerah										
PROGRAM : Penanggulangan Bencana										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			BPBD
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			BPBD
INDIKATOR : Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
PROGRAM : Penanggulangan Bencana										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			BPBD
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			BPBD
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			BPBD
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			BPBD
INDIKATOR : Jumlah kecamatan yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah, mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, system individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer										

BAPELITRANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

teknologi, serta kegiatan pembangunan.									
PROGRAM : Perlu kajian									
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji								
PROGRAM : Perlu kajian									
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji								

TUJUAN 14 : EKOSISTEM LANJUTAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2017	2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR : Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		Perikanan
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		Perikanan
INDIKATOR : Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.									
PROGRAM : Perlu Kajian									

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji			Perikanan						
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji			Perikanan						
INDIKATOR : Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
INDIKATOR : jumlah luas kawasan konservasi perairan										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
INDIKATOR : Persentase kepatuhan usaha										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
INDIKATOR : Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
PROGRAM :										

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1.	Dikaji									
Kegiatan 2.	Dikaji									
INDIKATOR : Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
INDIKATOR : Jumlah kecamatan dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
INDIKATOR : Jumlah nelayan yang terlindungi.										
PROGRAM : Pendataan Nelayan										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						

TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2017	2018	2019	2020	2021			

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

								(Juta Rp)		
INDIKATOR : Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Perikanan						
INDIKATOR : Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.										
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.										
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM :									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
INDIKATOR : Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
INDIKATOR : Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
INDIKATOR : Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.									
PROGRAM : Perlu Kajian									

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								

TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2017	2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR : Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk									
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		BPBD
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		
PROGRAM : Perlu Kajian									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		BPBD

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah kasus kejahatan pembunuhan satu tahun terakhir										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Bagian Hukum						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Bagian Hukum						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			kesbangpol						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			kesbangpol						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Kesbangol						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Kembangpol						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Kembangpol						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi anak 1-14 tahun yg mengalami hukuman fisik/ agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			KB, PP dan PA						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Prevalensi kekerasan terhadap anak L&P.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			KB, PP dan PA						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi L&P muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			KB, PP dan PA						

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM :										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									

BAPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				
INDIKATOR : Indeks Persepsi Korupsi (IPK)											
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				
INDIKATOR : Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.											
PROGRAM : Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja da kegiatan											
Kegiatan 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Dok	1	1	1	1	1	465.405.595	DAU	DPPKAD	
Kegiatan 2. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	dok	1	1	1	1	1	765.851.448			
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung	DAU	DPPKAD	
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				
INDIKATOR : Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Pemerintah Daerah.											
PROGRAM : Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja da kegiatan											
Kegiatan 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Dok	1	1	1	1	1	465.405.595	DAU	DPPKAD	
Kegiatan 2. Penyusunan laporan	Tersusunnya laporan	dok	1	1	1	1	1	765.851.448			

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

keuangan akhir tahun	keuangan akhir tahun										
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung		
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			
INDIKATOR : Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Pemerintah Daerah.											
PROGRAM : Evaluasi Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
Kegiatan 1. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban	LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD sesuai format dan target waktu yg ditentukan	Laporan	1	1	1	1	1	1	100.399.000	DAU	Tapem
Kegiatan 2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan	LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD sesuai format dan target waktu yg ditentukan	Laporan						1	96.900.000		
PROGRAM : Evaluasi Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
Kegiatan 1. Koordinasi penyusunan memori serah terima jabatan	Memori serah terima jabatan	Laporan						1	92.335.000	DAU	Tapem
Kegiatan 2. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	838.228.900		
INDIKATOR : Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.											
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dihitung		
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Tapem						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Pemerintah Daerah										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Tapem						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Tapem						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Pemerintah Daerah.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Humas						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Humas						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Sekwan							
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji										
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Sekwan							
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji										
INDIKATOR : Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Ess I & II).											
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Sekwan							
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji										
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Sekwan							
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji										
INDIKATOR : Indeks Lembaga Demokrasi.											
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			kesbangpol							
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji										
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Kesbangpol							

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Indeks Kebebasan Sipil										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Indeks Hak-hak Politik										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Kesbangpol						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Kesbangpol						
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Kesbangpol						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Kesbangpol						
INDIKATOR : Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil.										
PROGRAM : Perlu kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Dukcapil						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji			Dukcapil						

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Perlu kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				Dukcapil
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				
INDIKATOR : Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.											
PROGRAM : Perlu kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				Dukcapil
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				
PROGRAM : Perlu kajian											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				Dukcapil
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				
INDIKATOR : Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.											
PROGRAM : Program Penataan administrasi kependudukan											
Kegiatan 1. Persentase Anak yang memiliki akta kelahiran	Rasio anak yang memiliki akta lahir	%	0.070	0.08	0.09	0.01	0.11	90.000,000		DAU	Dukcapil
Kegiatan 2.											
PROGRAM : Program Penataan administrasi kependudukan											
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				Dukcapil
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji				



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			KB,PP dan PA						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Humas						

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji																		
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Humas						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Humas						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji			Humas						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
INDIKATOR : Jumlah kepemilikan sertifikat PPID.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji									
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji									

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.									
PROGRAM :									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								
PROGRAM :									
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji								
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji								

TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2017	2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR : Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.									
PROGRAM : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
Kegiatan 1. Bimbingan Teknis Tentang Simda Pendapatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Simda Pendapatan keg.	1	1	1	1	1	918.999.000	DAU	DPPKAD

BAPPSELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	DPPKAD						
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	-----	--------

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	DPPKAD						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	DPPKAD						
INDIKATOR : Rasio penerimaan pajak terhadap PDB										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	DPPKAD						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	DPPKAD						
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	DPPKAD						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	DPPKAD						
INDIKATOR : Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	DPPKAD						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	DPPKAD						
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	DPPKAD						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	DPPKAD						

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Proporsi individu yang menggunakan Internet.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
INDIKATOR : Persentase kecamatan 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
INDIKATOR : Pertumbuhan ekspor produk non migas										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	ESDM						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	ESDM						

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM ; Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	ESDM						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	ESDM						
INDIKATOR : Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU.										
PROGRAM ; Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Bappelitbang						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Bappelitbang						
PROGRAM ; Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Bappelitbang						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Bappelitbang						
INDIKATOR : Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek KPBU, transaksi proyek KPBU dan dukungan pemerintah										
PROGRAM ; Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Bappelitbang						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Bappelitbang						
PROGRAM ; Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Bappelitbang						
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji		DAU	Bappelitbang						

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		DAU	Statistik
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		DAU	Statistik
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		DAU	Statistik
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		DAU	Statistik
INDIKATOR : Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		DAU	Statistik
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		DAU	Statistik
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		DAU	Statistik
Kegiatan 2. Perlu Kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji		DAU	Statistik
INDIKATOR : Jumlah indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.										
PROGRAM : Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya										
Kegiatan 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Tersusunnya dokumen RAD-SDGs	Dok	1	1	1	1	1	1.343.000.000	DAU	Bappelitbang
Kegiatan 2. Koordinasi Perencanaan	Tersusunnya buku dok	dok	1	1	1	1	1	1.343.000.000	DAU	Bappelitbang

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan Bidang Sosial/Budaya	indikator bidang sosial budaya										
PROGRAM : Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya											
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			DAU	Bappelitbang
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			DAU	Bappelitbang
INDIKATOR : Review Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik											
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			DAU	Bappelitbang
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			DAU	Bappelitbang
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			DAU	Bappelitbang
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			DAU	Bappelitbang
INDIKATOR : Jumlah pejabat fungsional statistik dan pranata komputer pada PD.											
PROGRAM : Perlu Kajian											
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			DAU	BKPP
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			DAU	BKPP
PROGRAM :											
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			DAU	BKPP
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji	Dikaji			DAU	BKPP

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Persentase PD yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan atau Pranata Komputer.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji		DAU	BKPP						
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji		DAU	BKPP						
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji		DAU	BKPP						
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji		DAU	BKPP						
INDIKATOR : Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.										
PROGRAM : Perlu kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
PROGRAM : Perlu kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
INDIKATOR : Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS										
PROGRAM : Perlu kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM : Perlu kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
INDIKATOR : Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Dukcapil						
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Dukcapil						
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Dukcapil						
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Dukcapil						
INDIKATOR : Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji		DAU	Kominfo						

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR : Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer PD.										
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji		DAU	BKPP						
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji		DAU	BKPP						
PROGRAM : Perlu Kajian										
Kegiatan 1. Perlu kajian	Dikaji		DAU	BKPP						
Kegiatan 2. Perlu kajian	Dikaji		DAU	BKPP						

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI & PELAPORAN

3.1. MEKANISME PEMANTAUAN & EVALUASI

Mekanisme pemantauan dilakukan setiap tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan sampai 5 (lima) tahun ke depan. Evaluasi yang dilakukan terhadap indikator kinerja yang ditetapkan akan menghasilkan kesimpulan : 1) sudah tercapai; 2)masih berproses; dan 3)perlu kerja keras. Sehingga setiap tahunnya akan diperoleh informasi tentang besarnya prosentase pencapaian dari masing-masing tujuan. Dan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun berikutnya.

MATRIKS EVALUASI SDGs KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN (5 target dan 24 indikator)

TARGET/ INDIKATOR	TARGET	Hasil Evaluasi
	2016	
Target 1 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.		
Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.	15%	
Persentase dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi. Tdk memiliki rumah sendiri	541 1.620	

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Air yang tidak terlindungi	234	
Tidak memiliki listrik	4.361	
Tdk memiliki jamban	4.037	
Tdk memiliki septictank		
Target 2 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan		
Jumlah penduduk PBI melalui JKN/KIS.	31.480	
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		
Jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (340 disabilitas)	340	
Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat.(PKH)	2.233	
Target 3 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		
Persentase/jumlah Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	83,3	
Persentase/jumlah anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Belum didata	Didata
Jumlah/Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Belum didata	Didata
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	68	
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	41,50	
Angka Partisipasi Murni (APM) di SD/MI/ sederajat.	83,74	
Angka Partisipasi Murni (APM) di SMP/MTs/ sederajat.	63,33	
Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran.	Belum didata	Didata
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (BDT = 5.134)	Belum didata	Didata
Target 4 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana		
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Blm terdata	
Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Blm terdata	
Jumlah Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Blm terdata	
Jumlah Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Blm terdata	
Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Blm terdata	
Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Blm terdata	
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah. (Tier II).	Perlu kajian	
Target 5 : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.		
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk	Blm terdata	

**BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017**

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

program pemberantasan kemiskinan.		
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Belum didata	Didata

TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN (5 target dan 17 indikator)

TARGET/INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.		
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Belum didata	Didata
Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	1,17%	1,17%
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Tdk terdata	
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	1400 Kkal/kapita/hr	
Target 2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.		
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	93%	
Prevalensi Malnutrisi (<i>wasting/obesitas</i>) pada anak balita.	0	
Prevalensi anemia pada ibu hamil.	10,75%	10,75%
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	59%	57%
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	79,4 %	83,4%
Target 3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian		
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Tidak terdata	terdata
Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam.	Tidak terdata	terdata
Terlaksananya distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh tani dan nelayan.	Tidak terdata	terdata
Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu.	Tidak terdata	terdata
Target 4 : Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan		
Tersalurkannya sarana dan produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan.	100%	100%

**BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017**

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Target 5 : Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.

Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	Tidak terdata	Tidak terdata
Terselenggaranya sistem pengembangan, pembinaan, pengawasan dan sertifikasi perbenihan dan perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang efisien di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat di kecamatan.	Tidak terdata	Tidak terdata
Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Tidak terdata	Tidak terdata

**TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA
(12 target dan 43 indikator)**

TARGET / INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.		
Angka Kematian Ibu (AKI).	5/100.000	Terdata
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	83,3 %	Terdata
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Tidak terdata	Terdata
Target 2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.		
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	20,1/1000	Terdata
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	terdata	Terdata
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	6,76/1000	Terdata
Persentase kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	69,79	Terdata
Target 3 : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.		
Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	Tidak Terdata	Terdata
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Tidak Terdata	Terdata
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	133%	90%
Kejadian Malaria per 1000 orang.	23/1000	Terdata
Jumlah kecamatan dengan eliminasi Malaria	Tdk terdata	Terdata
Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	-	Terdata
Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Tdk terdata	Terdata

**BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017**

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobati.	-	Terdata
Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta.	Tdk terdata	Terdata
Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis 100%.	100%	Terdata
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis.	100%	Terdata
Target 4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.		
Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	100%	Terdata
Prevalensi tekanan darah tinggi.	Tidak terdata	Terdata
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Tidak terdata	Terdata
Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara.	10%	Terdata
Angka kematian dari percobaan bunuh diri.	Tidak terdata	Terdata
Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Tidak terdata	Terdata
Target 5 : Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.		
Jumlah penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan.	Tidak terdata	Terdata
Jumlah yang menyelesaikan program rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Tidak terdata	Terdata
Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak terdata	Terdata
Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Tidak terdata	Terdata
Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Tidak terdata	Terdata
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Tidak terdata	Terdata
Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Tidak terdata	Terdata
Target 6 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.		
Proporsi pasangan usia subur (umur 15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Metneed KB/ Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Tidak terdata	Terdata
Jumlah Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Tidak terdata	Terdata
Jumlah Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Tidak terdata	Terdata
Jumlah Total Fertility Rate (TFR).	Tidak terdata	Terdata
Target 7 : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.		
Unmet need pelayanan kesehatan.	100%	100%

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	57%	Terdata
Jumlah Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	64,46 %	Terdata

Target 8 : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

Angka kematian akibat keracunan.	Tidak Terdata	Terdata
----------------------------------	---------------	---------

Target 9 : Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara

Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Tidak Terdata	Terdata
--	---------------	---------

Target 10 : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100%	Terdata
---	------	---------

Target 11 : Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

<i>Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan:</i>		
Rasio dokter/penduduk	32/100.000	
Rasio dokter spesialis/penduduk	5/100.000	
Rasio tenaga kesehatan /penduduk	38/100.000	

Target 12 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI).	5/100.000	
---------------------------	-----------	--

TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS (7 target dan 21 indikator)

TARGET / INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SDSMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif		
Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Tidak Terdata	Terdata
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Tidak Terdata	Terdata
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Tidak Terdata	Terdata
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	95	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	76,39	

**BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017**



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tidak Terdata	Terdata
Target 2 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.		
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		
Target 3 : Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.		
Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Tidak Terdata	Terdata
Target 4 : Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.		
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat.	76%	
APM SMP/MTs/ sederajat;	76%	63,33%
Target 5 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.		
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	96,00	
Target 6 : Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua		
Proporsi sekolah dengan akses ke listrik.	Tidak Terdata	Terdata
Proporsi sekolah dengan akses ke internet untuk tujuan pengajaran.	Tidak Terdata	Terdata
Proporsi sekolah dengan akses ke komputer untuk tujuan pengajaran.	Tidak Terdata	Terdata
Proporsi sekolah dengan akses ke infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas.	Tidak Terdata	Terdata
Proporsi sekolah dengan akses ke air minum layak.	Tidak Terdata	Terdata
Proporsi sekolah dengan akses ke fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin.	Tidak Terdata	Terdata
Proporsi sekolah dengan akses ke fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis) bagi semua (WASH).	Tidak Terdata	Terdata
Target 7 : Pada tahun 2030, Secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.		
Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	Tidak Terdata	Terdata
Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	Tidak Terdata	Terdata
Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	Tidak Terdata	Terdata

TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER (6 target dan 17 indikator)

TARGET / INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1 : Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.		
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	-	
Target 2 : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.		
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak Terdata	Terdata
Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	Tidak Terdata	Terdata
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak Terdata	Terdata
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Tidak Terdata	Terdata
Target 3 : Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.		
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun	Tidak Terdata	Terdata
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.	Tidak Terdata	Terdata
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Tidak Terdata	Terdata
Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Tidak Terdata	Terdata
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	91.23	Terdata
Target 4 : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.		
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah (DPRD Kabupaten)	Tidak Terdata	Terdata
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Tidak Terdata	Terdata
Target 5 : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut		
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Tidak Terdata	Terdata
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Tidak Terdata	Terdata
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Tidak Terdata	Terdata
Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Tidak Terdata	Terdata

**BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017**

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Target 6 : Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.

Tidak
Terdata

Terdata

TUJUAN 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (8 target dan 28 indikator)

TARGET / INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1 : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.		
<i>Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.</i>	Tidak Terdata	Terdata
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	52,05	Terdata
Target 2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		
<i>Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.</i>	Tidak Terdata	Terdata
<i>Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.</i>	Tidak Terdata	Terdata
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	41,50	
Jumlah desa/keurahan yang melaksanakan STBM	Tidak Terdata	Terdata
Jumlah kec yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan dan komunal.	Tidak Terdata	Terdata
Target 3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dgn mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.		
Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	Tidak Terdata	Terdata
<i>Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.</i>	Tidak Terdata	Terdata
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Tidak Terdata	Terdata
Target 4 : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air		
Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Tidak Terdata	Terdata
Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Tidak Terdata	Terdata
Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Tidak Terdata	Terdata
Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.	Perlu kajian	Dikaji
Target 5 : Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.		
Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Perlu kajian	Dikaji
Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang	Perlu kajian	Dikaji

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

diinternalisasi ke dalam RTRW.

--	--	--

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Tidak terdata	Terdata
Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas kab/kota.	Tidak terdata	Terdata
Jumlah wilayah sungai (WS) yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Tidak terdata	Terdata
Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Tidak terdata	Terdata
Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumbu resapan.	Perlu kajian	Dikaji
Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Perlu kajian	Dikaji
Proporsi wilayah cakupan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Perlu kajian	Dikaji
Target 6 : Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau		
Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Perlu kajian	Dikaji
Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Perlu kajian	Dikaji
Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Tidak Terdata	Terdata
Target 7 : Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang		
Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Perlu kajian	Dikaji
Target 8 : Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi		
Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi	Perlu kajian	Dikaji

TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU (3 Target dan 5 Indikator)

TARGET / INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.		
Rasio elektrifikasi	Perlu kajian	Dikaji
Konsumsi listrik per kapita	Perlu kajian	Dikaji
Rasio penggunaan gas rumah tangga	Perlu kajian	Dikaji
Target 2 : Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.		
Bauran energi terbarukan.	Perlu kajian	Dikaji
Target 3 : Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energy di tingkat global sebanyak dua kali lipat		
Intensitas energi primer.	Perlu kajian	Dikaji

**BAPPSELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017**

TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (8 Target & 21 Indikator)

HASIL	INDIKATOR	
	TARGET	2016
Target 1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.		
Laju pertumbuhan PDB per kapita.		Bappelitbang
PDB per kapita		
Target 2 : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.		
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Perlu kajian	Dikaji
Target 3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produksi, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Perlu kajian	Dikaji
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Perlu kajian	Dikaji
Persentase tenaga kerja formal	Perlu kajian	Dikaji
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Perlu kajian	Dikaji
Persentase akses layanan keuangan formal UMKM	Perlu kajian	Dikaji
Target 4 : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	Perlu kajian	Dikaji
Upah rata-rata per jam bekerja	Perlu kajian	Dikaji
Tingkat pengangguran terbuka	7,81	Terdata
Persentase setengah pengangguran	Perlu kajian	Dikaji
Target 5 : Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	Perlu kajian	Dikaji
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Perlu kajian	Dikaji
Target 6 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Perlu kajian	Dikaji
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Perlu kajian	Dikaji
Jumlah wisatawan mancanegara	Tidak terdata	Terdata
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Tidak terdata	Terdata
Jumlah devisia sektor pariwisata	Tidak terdata	Terdata
Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Tidak terdata	Terdata
Target 7 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.		

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Tidak terdata	Terdata
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Perlu Kajian	Dikaji
Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (15 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak	Tidak terdata	Terdata
Target 8 : Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization		
Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Tidak terdata	Terdata

**TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR
(5 Target & 10 Indikator)**

TARGET / INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua		
Kondisi mantap jalan nasional	Tidak terdata	Terdata
Jumlah pelabuhan strategis	Tidak terdata	Terdata
Target 2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.		
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Tidak terdata	Terdata
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Tidak terdata	Terdata
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Tidak terdata	Terdata
Target 3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.		
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Tidak terdata	Terdata
Target 4 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.		
Proporsi anggaran riset pemerintah. (dihitung)	Perlu Kajian	Dikaji
Target 5 : Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.		
Proporsi rumah tangga terlayani mobile broadband	Perlu kajian	Dikaji
Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Perlu kajian	Dikaji
Proporsi individu yang menggunakan Internet	Perlu kajian	Dikaji

BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017

TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN (4 Target & 14 Indikator)

TARGET / INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1 : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.		
Koefisien Gini	Perlu kajian	Dikaji
Tingkat kemiskinan	15%	
Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Perlu kajian	Dikaji
Jumlah Desa Tertinggal	Perlu kajian	Dikaji
Jumlah Desa Mandiri	1	1
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Perlu kajian	Dikaji
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Perlu kajian	Dikaji
Target 2 : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.		
Indeks Kebebasan Sipil.	Perlu kajian	Dikaji
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Tidak terdata	Terdata
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Tidak terdata	Terdata
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Tidak terdata	Terdata
Target 3 : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar		
Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Tidak terdata	Terdata
Target 4 : Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik		
Ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Tidak terdata	Terdata
Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Tidak terdata	Terdata

TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN (6 Target & 12 Indikator)

TARGET / INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.		

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Tidak terdata	Terdata
--	---------------	---------

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Target 2 : Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.		
Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Tidak terdata	Terdata
Target 3 : Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.		
Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	Tidak terdata	Terdata
Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan.	Tidak terdata	Terdata
Target 4 : Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia		
Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)	Tidak terdata	Terdata
Target 5 : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.		
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tidak terdata	Terdata
Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tidak terdata	Terdata
Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Perlu kajian	Dikaji
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Tidak terdata	Terdata
Target 6 : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.		
Proporsi ruang terbuka hijau untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Tidak terdata	Terdata
Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Tidak terdata	Terdata
Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Tidak terdata	Terdata

**TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGUNGJAWAB
(6 Target & 9 Indikator)**

TARGET / INDIKATOR	TARGET	Hasil Evaluasi
	2016	
Target 1 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.		

**BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017**



RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Tidak terdata	Terdata
Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.	Tidak terdata	Terdata
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	43%	
Target 2 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.		
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	63 %	
Target 3 : Mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan		
Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Tidak terdata	Terdata
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Tidak terdata	Terdata
Target 4 : Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional		
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Tidak terdata	Terdata
Target 5 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.		
Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Tidak terdata	Terdata
Target 6 : Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.		
Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.	Tidak terdata	Terdata

TUJUAN 13 : PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (2 Target & 3 Indikator)

TARGET / INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.		
Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1 dok	1 dok
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tidak terdata	Terdata
Target 2 : Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.		
Jumlah kecamatan yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah, mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, system individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.	Belum terkurikulum	

TUJUAN 14 : EKOSISTEM LANJUTAN (7 Target dan 9 Indikator)

TARGET / INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1 : Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.		
Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.	Tidak terdata	Terdata
Target 2 : Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan..		
Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	Tidak terdata	Terdata
Target 3 : Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dlm waktu singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya		
Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Tidak terdata	Terdata
Target 4 : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 % wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah yang tersedia		
Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Tidak terdata	Terdata
Target 5 : Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.		
Persentase kepatuhan usaha	Perlu kajian	Dikaji
Target 6 : Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang		
Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Perlu kajian	Dikaji
Target 7 : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar		
Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Perlu kajian	Dikaji
Jumlah kecamatan dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Perlu kajian	Dikaji
Jumlah nelayan yang terlindungi.	Tidak didata	terdata

TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN (6 Target dan 9 Indikator)

INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1 : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.		
Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Perlu kajian	Dikaji
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Perlu kajian	Dikaji
Target 2 : Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah		
Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Tidak didata	Terdata
Target 3 : Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan SD genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.		
Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Perlu kajian	Dikaji
Target 4 : Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan kehati dalam perencanaan daerah, proses pembangunan, strategi & penganggaran		
Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020	Perlu kajian	Dikaji
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Perlu kajian	Dikaji
Target 5 : Memobilisasi dan meningkatkan SD keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.		
Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan	Perlu kajian	Dikaji
Target 6 : Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.		
Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap	Perlu kajian	Dikaji
Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Perlu kajian	Dikaji

TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (9 Target & 33 Indikator)

TARGET / INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 2017		

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

gun.		
Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	Tidak didata	terdata
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan satu tahun terakhir.	Tidak didata	terdata
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Tidak didata	terdata
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak didata	terdata
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Tidak didata	terdata
Target 2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.		
Proporsi anak 1-14 tahun yg mengalami hukuman fisik/ agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.	Tidak didata	terdata
Prevalensi kekerasan terhadap anak L&P.	Tidak didata	terdata
Proporsi L&P muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tidak didata	terdata
Target 3 : Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.		
Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Tidak didata	terdata
Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Tidak didata	terdata
Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Tidak didata	terdata
Target 4 : Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.		
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Belum dikaji	Dikaji
Indeks Persepsi Korupsi (IPK).	Belum dikaji	Dikaji
Target 5 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat		
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Tidak terdata	Didata
Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Pemerintah Daerah.	WTP	WTP
Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Pemerintah Daerah.	C	C
Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.	Tidak terdata	Didata
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Pemerintah Daerah	Tidak terdata	Didata
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Pemerintah Daerah.	Belum dikaji	Dikaji
Target 6 : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan		
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Belum dikaji	Dikaji
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Ess I & II).	Belum dikaji	Dikaji
Indeks Lembaga Demokrasi.	Belum dikaji	Dikaji
Indeks Kebebasan Sipil.	Belum dikaji	Dikaji
Indeks Hak-hak Politik.	Belum dikaji	Dikaji

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Target 7 : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.		
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil.	Belum didata	Didata
Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Belum didata	Didata
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	49 %	
Target 8 : Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.		
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM.	Belum didata	Didata
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Belum didata	Didata
Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Perlu kajian	Dikaji
Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Perlu kajian	Dikaji
Jumlah kepemilikan sertifikat PPID.	Belum didata	Didata
Target 9 : Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.		
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. (perlu di tinjau)	Belum didata	Didata

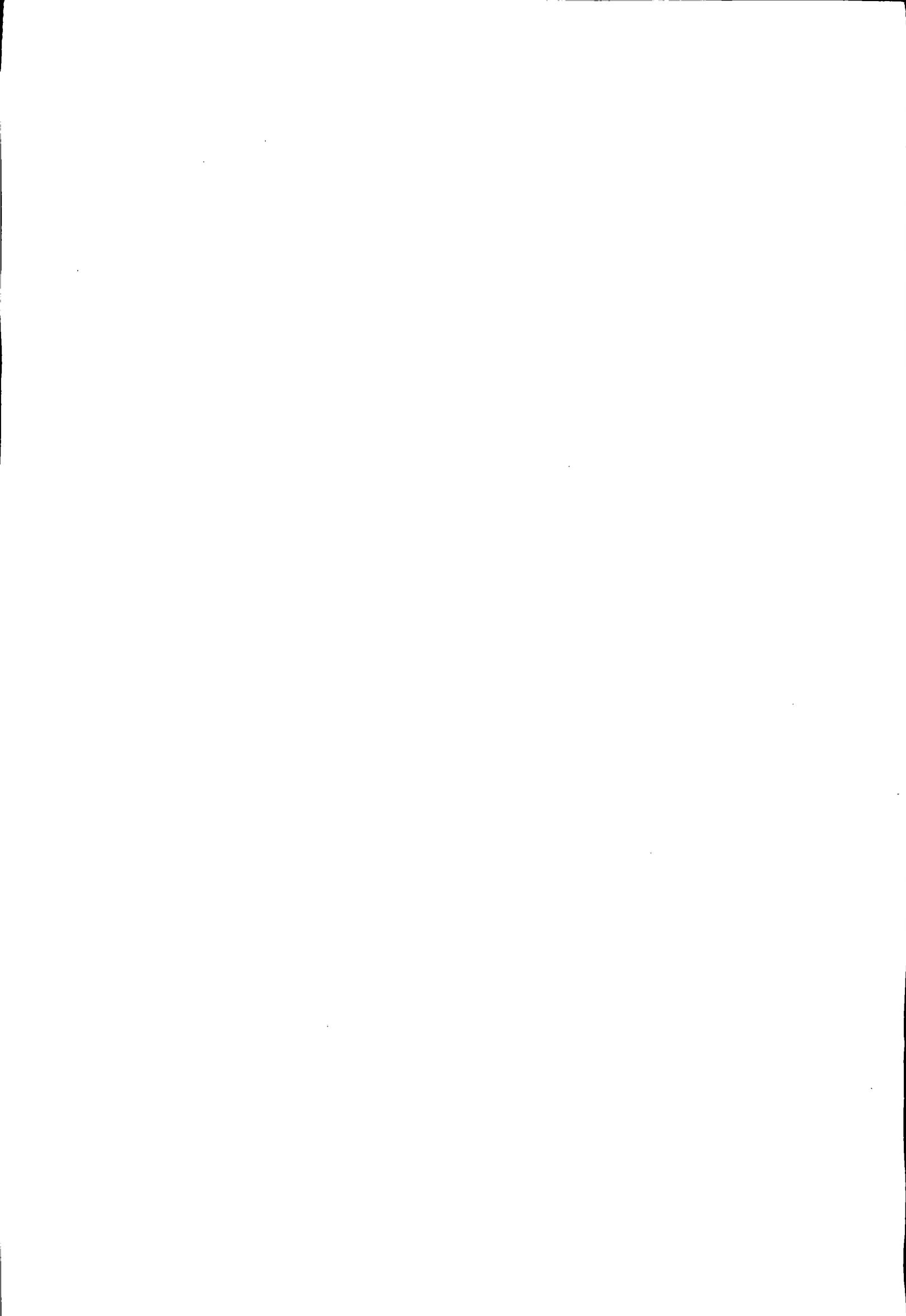
**TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
(6 Target & 19 Indikator)**

TARGET / INDIKATOR	TARGET	Hasil
	2016	Evaluasi
Target 1: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	-	
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Belum didata	Didata
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Belum didata	Didata
Target 2 : Penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang thn 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi (teknologi informasi dan komunikasi).		
Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Belum didata	Didata
Persentase kecamatan 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Belum didata	Didata
Target 3 : Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada		

**BAPPELITBANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2017**

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

tahun 2020		
Pertumbuhan ekspor produk non migas	Belum didata	Didata
Target 4 : Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.		
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU.	Belum didata	Didata
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek KPBU, transaksi proyek KPBU dan dukungan pemerintah.	Belum didata	Didata
Target 5 : Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas utk negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Belum didata	Didata
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Belum didata	Didata
Jumlah indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	294	Dikaji
Review Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	Belum dikaji	Dikaji
Target 6 : Meningkatkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.		
Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada PD.	Belum didata	Didata
Persentase PD yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan atau Pranata Komputer.	Belum didata	Didata
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Belum didata	Didata
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS.	Belum dikaji	Dikaji
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Belum didata	Didata
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Belum didata	Didata
Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer PD.	Belum didata	Didata



3.2. MEKANISME PELAPORAN

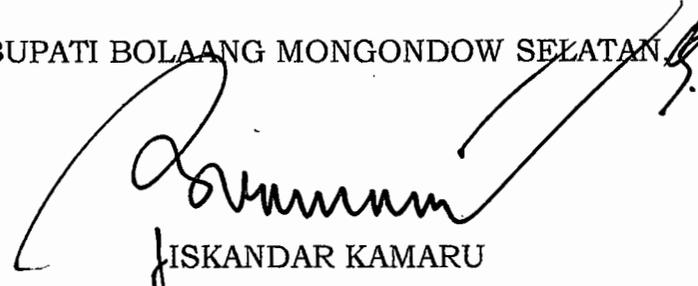
Berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat/daerah dengan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator, upaya-upaya yang dilakukan, *lesson learned*, *best practices*, *human stories*, masalah dan tantangan kemiskinan yang dihadapi, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

Disamping itu, laporan ini juga akan berisikan uraian tentang program, kegiatan, indikasi anggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lain yang meliputi OMS dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar.

BAB IV PENUTUP

Dokumen ini dibuat sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan mencapai Tujuan pembangunan berkelanjutan dalam 5 (lima) tahun.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


FISKANDAR KAMARU